



LAPORAN

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II // 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 27 Januari 2022. Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Triwulan II ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 April s.d. 31 Juni 2022. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim hingga Triwulan II.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 15 Juli 2022
Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,

Jodi Mahardi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	21
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	23
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	31
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	76
3.2. Realisasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024	8
Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat	32
Gambar 4. Perbandingan Realisasi KUR 2021 dan 2022	36
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Rapat	36
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rapat	37
Gambar 7. Semula Menjadi Desain Konstruksi Shrimp Estate	40
Gambar 8. Dokumentasi Drone Progres Pembangunan	40
Gambar 9. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	43
Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Rapat	45
Gambar 11. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	46
Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pemetaan Kompetensi Awak Kapal Perikanan	52
Gambar 13. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Pemetaan Kompetensi Awak Kapal Perikanan	53
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Rapat	53
Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat	54
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Sukabumi	60
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Kab Subang	61
Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Kab Sampang	62
Gambar 19. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	64
Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Lapangan	65
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan	66
Gambar 22. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	68
Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi	70
Gambar 24. Grafik Kerjasama Indonesia-Korea	72
Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rapat	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022.....	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	15
Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022	16
Tabel 5. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW II	17
Tabel 6. Catatan terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores	25
Tabel 7. Catatan terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka	25
Tabel 8. Data Kondisi Kapal Hasil Identifikasi Ground Checking	55
Tabel 9. Data Dokumen Perizinan Kapal Hasil Identifikasi.....	56
Tabel 10. Indikator Penilaian PMPRB Deputi II Tahun 2022	77
Tabel 11. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	79
Tabel 12. Alokasi Pagu Anggaran Efektif Tahun 2022.....	79
Tabel 13. Realisasi Anggaran TW II TA 2022 Per Kegiatan	80
Tabel 14. Realisasi Anggaran TW II TA 2022 per RO	81



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD

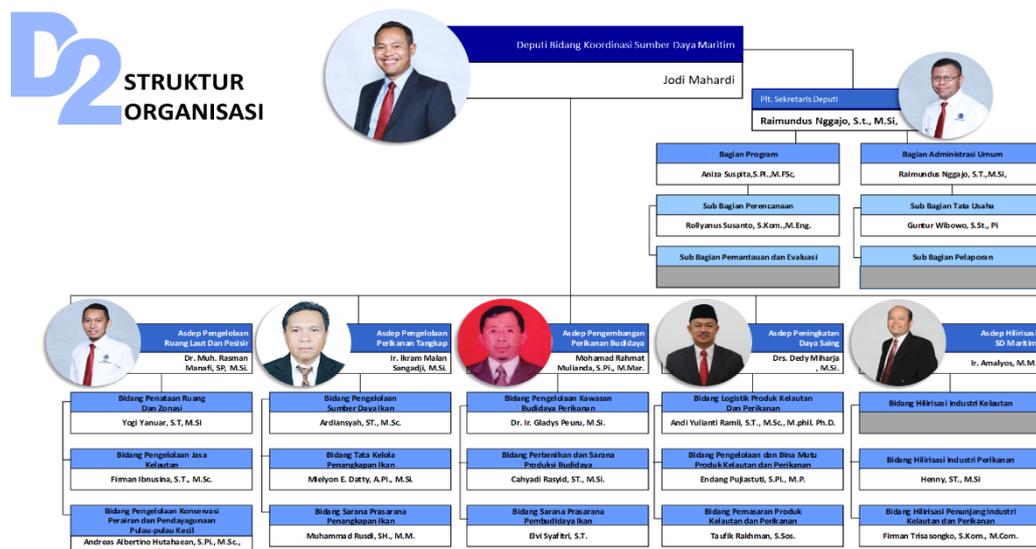
Maritim ditetapkan pada Triwulan III dan IV (TW III dan IV), sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dalam mendukung capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2021.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputi SD Maritim hingga 31 Desember 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

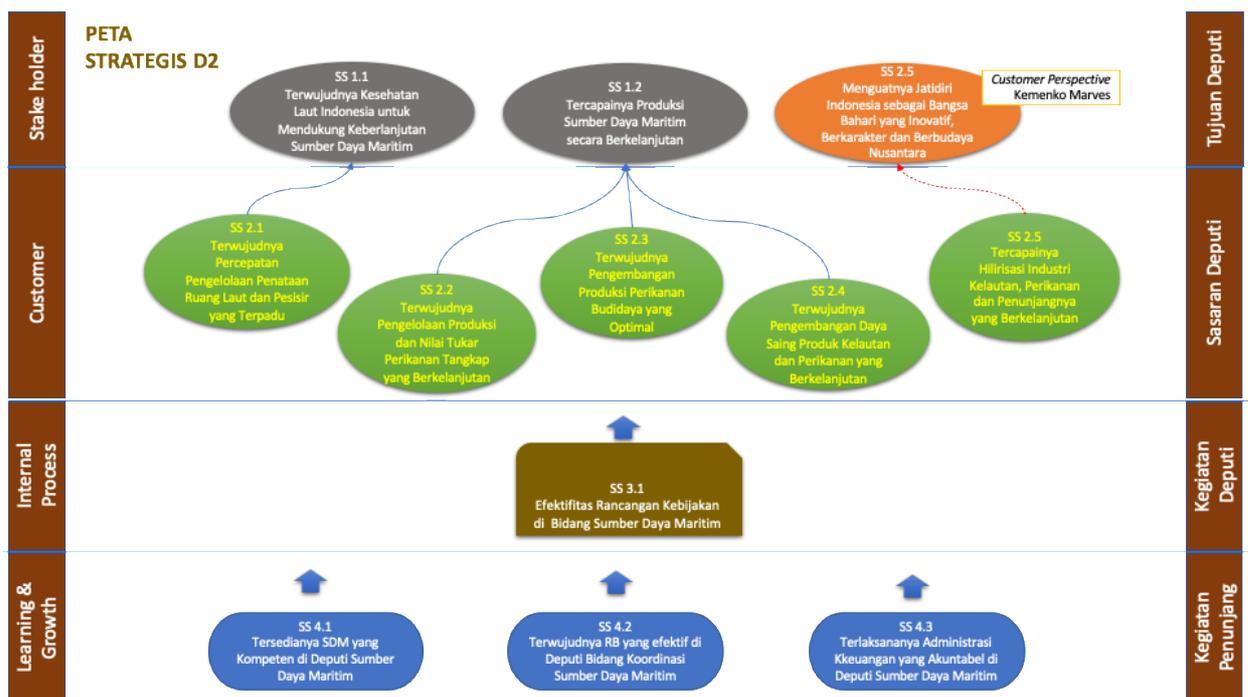
1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022

<i>Stakeholder</i>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<i>Customer</i>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<i>Internal Business Process</i>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<i>Learning and Growth</i>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	80%
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	80%
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	80%
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	80%
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	80%
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	95%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	75
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	97

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

- IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat = Nilai Variabel IKLI Tujuan 1 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 2 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 5 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 6 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 7 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 8 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 9 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

- IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}}{\text{(Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

2

- IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan rata-rata dari capaian rencana zonasi yang diselesaikan, capaian IKLI pada Tahun 2022, dan capaian luas kawasan konservasi

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Capaian Jumlah RZ Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah RZ Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian IKLI Tahun 2022}}{\text{Target IKLI Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}}{3} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2022 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2022 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022. Target dimaksud merujuk pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2022 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Daya Saing Produk Kelautan Perikanan adalah suatu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dalam meningkatkan daya saing usaha hasil perikanan dengan pengefisiensi usaha, mutu dan keamanan produk dalam melakukan inovasi dalam pemasaran produk perikanan yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Formula:

$$\left(\frac{\text{Capaian Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}}{\text{Target Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}} + \frac{\text{Capaian Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}}{\text{Target Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP tahun 2022}} \right) \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan

rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

Formula:

Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 7 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.226.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021 dan Nomor: S-458/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-	Rp359.248.000,-	Rp3.140.752.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-	Rp338.377.000,-	Rp2.461.623.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-	Rp324.074.000,-	Rp2.375.926.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-	Rp297.200.000,-	Rp1.952.800.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-	Rp300.639.000,-	Rp1.949.361.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-	Rp136.108.000,-	Rp1.390.882.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp208.884.000,-	Rp1.991.116.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-	Rp. 1.964.530.000,-	Rp15.262.460.000

BAB
3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputy SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan III dan IV. Berikut adalah hal-hal yang telah dicapai pada Triwulan II TA 2022 guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan pada PK Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022:

Tabel 5. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW II

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW II
Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Telah ditetapkan 6 Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZKAW) sehingga hingga saat ini telah terbit 7 Perpres RZKAW
	Telah membentuk Jejaring Pemantauan Ekosistem Pesisir Indonesia untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir
	Telah berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan World Economic Forum 2022 di Davos, Swiss terkait Blue Economy dan pertemuan UN Ocean Conference
	Telah disampaikan Draf Finalisasi Juknis Peneggelaman Kapal Eks KRI
	Telah dilakukan pembahasan kerjasama Indonesia Jerman terkait terumbu karang dan rapat koordinasi teknis membahas penjajakan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi
	Pemprov DKI telah mengadopsi IKLI dalam Renstra DKPKP untuk Tahun 2023-2026.
Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Telah dilakukan penyusunan Perpres Ekonomi Biru untuk mendukung program Blue Halo S dan sedang dilakukan penelaahan oleh pakar
	Telah dilakukan pengawalan kebijakan penangkapan ikan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada bidang perikanan tangkap dengan

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW II
	<p>tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial</p> <p>Telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan sebagai dorongan peningkatan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan produksi perikanan tangkap.</p> <p>Telah disusun dokumen pengawalan regulasi kebijakan perikanan tangkap, peningkatan kapasitas dan perlindungan SDM perikanan tangkap, dokumen pengawalan regulasi dengan melakukan percepatan penyusunan rancangan Perpres Lumbung Ikan Nasional dan pengendalian implementasi Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang STCW-F dan Permen-KP No. 33 Tahun 2021 dan dokumen uji petik pemetaan kompetensi awak kapal perikanan dan nelayan sebagai implementasi pelaksanaan Perpres No. 18 Tahun 2019 di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan NTT.</p> <p>Telah dilakukan pengawalan program Kampung Nelayan Maju dan masih dalam proses pembahasan program BBM subsidi bagi nelayan dan dokumen pengaturan kapal perikanan mendorong pemanfaatan kembali kapal ex moratorium yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas industri perikanan tangkap.</p>
Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	<p>Telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Eksport Tahun 2022-2024 yang telah disahkan didalam SK Pokjanas Kemenko Marves dalam hal ini akan dijadikan acuan bersama pada program Akselerasi Industrialisasi Udang Nasional</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pembahasan KUR maritim untuk mendukung transformasi ekonomi pedesaan, diskusi optimalisasi kur perikanan, rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak dan pengembangan tambak tradisional plusi di Kota Surabaya, pelaksanaan kunjungan lapangan dan koordinasi dalam rangka program revitalisasi irigasi pertambakan di Provinsi Jawa Timur dan koordinasi dan peninjauan lapangan <i>shrimp estate</i> di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Telah dilakukan peninjauan calon lokasi pendirian laboratorium kultur jaringan di Kabupaten Maluku Tenggara</p> <p>Telah disusun dokumen koordinasi pembahasan pembuatan FS dengan BRIN sebagai bentuk tindak lanjut Rakor, Kunlap dan surat Deputi kepada Kepala BRIN, terkait rencana pembangunan unit Iradiator di</p>

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW II
	3 lokasi Pelabuhan Perikanan Strategis (Surabaya, Bitung, Belawan).
Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Telah melakukan Bilateral Meeting Ke-14 antara GACC dan BKIPM KKP tanggal 7 Juni 2022 dalam rangka Upaya Penanganan Kasus Penolakan UPI yang ternotifikasi Covid-19
	Telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan dari Ditjen. PDSPKP KKP dan Kegiatan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan di Kab. Sukabumi, Kab. Sampang, dan Kab. Subang
	Telah dilaksanakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam rangka Menjaga Kualitas Ekspor Produk KP serta Pemenuhan Persyaratan Mutu dari Negara Buyer
	Telah disusun dokumen kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dalam proyek Solar Cold Chain for a Green Economy (SOCOOL) 2022 sampai dengan 2024 dan Dokumen pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Kajian Rantai Pasok Dingin Hijau (Green Cold Chain) di Sektor Perikanan dengan GIZ dan P2M Universitas Indonesia. target penyelesaian kajian tersebut adalah Bulan Desember 2022.
	Telah disusun dokumen koordinasi konsep pengelolaan Pasar Ikan Modern di 3 lokasi yaitu Kota Palembang, DKI Jakarta, dan Kabupaten Bandung, dokumen monitoring terkait bantuan cold storage portable dari KKP untuk mendukung peningkatan pemasaran ikan di Kab. Sukabumi, Kab. Madura, dan Kab. Subang dan dokumen pemetaan potensi perikanan dan kelautan di Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat yang sedang diupayakan untuk menjadi SKPT wilayah Papua Barat.
	Telah disusun dokumen sinergitas baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan standar kualitas dan kuantitas hasil ekspor produk KP yang baik dan terintegrasi, dokumen kesepakatan bersama dengan KKP terkait penerapan sistem jaminan mutu produk KP dan dokumen pelaksanaan koordinasi untuk penetapan Kota Bitung sebagai pilot project penanganan produk KP yang terpadu.
Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Telah terbit sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB) dengan No Sertifikat PW-S.01.04.1.3.332.06.22-0069 tanggal 29 Juni 2022 untuk Garam Farmasi Natrium Klorida PT Karya Daya Syafarmasi.
	Telah terbit sertifikat TKDN kincir air 1 phase buatan dalam negeri produksi PT Barata bekerja sama

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW II
	dengan Poltek KP Sidoarjo dengan Nomor Tanda Sah: 6199/SJ-IND.8/TKDN /7/2021 dengan nilai 40.15%
	Telah terbit sertifikat SNI produk kincir air 1 phase produksi PT Barata Indonesia dengan No. Sertifikat: PCS 01078.01
	Telah terbit TKDN produk kincir air 1 phase produksi PT Om Whahaha dengan No. Sertifikat: 2013/SJ-IND.8/TKDN/6/2022
	Telah terbit TKDN produk kincir air 3 phase produksi PT Om Whahaha dengan No. Sertifikat: 471/SJ-IND.8/TKDN/3/2022
	Telah terbangun prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton serta 20 dan 40 feet produksi PT INKA (Persero) dan dalam proses pengujian sertifikasi SNI dan TKDN oleh LSPro.
	Draft awal Implementing Arrangement (IA) ODA Project Pemanfaatan Satelit ini telah diperoleh dari pihak KHOA, dan sedang dalam pembahasan antara MTCRC dan internal Marves
	Telah terbit sebanyak 10 sertifikat izin edar pangan olahan (izin MD) untuk UMKM pangan olahan berbahan dasar ikan (Pempek Palembang) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang (ASSPPEK)
	Telah dilakukan fasilitasi koperasi sektor kelautan dan perikanan dengan K/L terkait untuk dukungan peningkatan produktivitas hasil tangkapan dan pemasaran melalui fasilitasi bantuan sarana dan prasarana serta fasilitasi dukungan akses permodalan
	Telah dilakukan pemasangan reefer container pada KM Bukit Raya (Armada PT PELNI) kapasitas 1 ton (1 unit) dan 5 ton (1 unit) dengan rute Jakarta-Blinyuu-Natuna-Pontianak-Surabaya
	Telah dilaksanakan rapat koordinasi teknologi <i>carbon capture storage</i> (CSS) sebagai salah satu kunci utama untuk Indonesia menuju net zero emission
	Telah dilaksanakan kegiatan kunjungan lapangan dan koordinasi rencana kerjasama PT. Garam dengan K-UTEC AG Salt Technologies di sektor pergaraman
	Telah dilaksanakan pembahasan rencana kerjasama investasi pergaraman DSPL dan PT. Garam (Persero)
	Telah disusun Dokumen pembahasan implementasi ODA Project pemanfaatan satelit GEO-KOMPSAT-2B milik korea
	Telah disusun Draft awal Implementing Arrangement (IA) ODA Project Pemanfaatan Satelit ini yang telah diperoleh dari pihak KHOA
	Telah dilakukan koordinasi "Strengthening Collaboration between Deputi Bidang Koordinasi

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW II
Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Sumber Daya Maritim and United Nations in Indonesia” Telah dilakukan koordinasi dengan Aspotmar Kasal

Berikutnya, progres kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*. Berikut adalah penjelasan detail dari progres kegiatan pada setiap sasaran strategis:

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2021 adalah 76,76. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2022 adalah 76.

Pengukuran IKLI akan dilakukan pada akhir tahun. Saat ini, Kemenko Marves mendorong provinsi untuk dapat memasukan pengukuran IKLI pada renstra masing-masing provinsi. Kebijakan Kelautan Indonesia dan IKLI disosialisasikan bersamaan dengan momen sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diselenggarakan

Dinas Kelautan dan Provinsi. Hingga Juni 2022, telah dilakukan sosialisasi pengukuran IKLI. Output antara yang dihasilkan pada Triwulan II Tahun 2022 terkait IKLI adalah Pemprov DKI telah mengadopsi IKLI dalam Renstra DKPKP untuk Tahun 2023-2026.

2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim***.

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2022. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Pada Tahun 2021, capaian produk perikanan tangkap dan budidaya adalah 8.088 juta ton untuk perikanan tangkap dan 16,39 Juta Ton untuk perikanan budidaya. Sedangkan capaian nilai ekspor pada Tahun 2021 adalah 5,45 US\$. Nilai capaian produksi perikanan dan nilai ekspor perikanan pada Tahun 2021 statusnya masih prognosa karena masih dilakukan kajian lebih lanjut terhadap capaian tersebut.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Secara matematis sesuai dengan Dokumen RKP 2022, detail dari target IKU ini adalah sebagai berikut:

- Target Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 adalah 8,69 Juta ton
- Target Produksi Rumput Laut pada Tahun 2022 adalah 11,8 Juta ton
- Target Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 adalah 8,88 Juta Ton
- Target Nilai Ekspor Perikanan pada Tahun 2022 adalah 7,13 US\$ Miliar

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan Tahun 2022 dengan variabel yang telah dijelaskan di atas, pada Triwulan II Tahun 2022 untuk pengelolaan perikanan tangkap telah dilakukan penyusunan regulasi, pengawalan kebijakan penangkapan ikan terukur, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan. Kemudian dalam rangka mendukung produksi perikanan budidaya, telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Tahun 2022-2024 yang telah disahkan didalam SK Pokjanas Kemenko Marves dalam hal ini akan dijadikan acuan bersama pada program Akselerasi Industrialisasi Udang Nasional.

Progres yang telah dicapai dalam rangka dukungan nilai ekspor Tahun 2022 adalah telah disusun dokumen koordinasi dengan GACC dan BKIPM KKP dalam rangka upaya penanganan kasus penolakan UPI yang ternotifikasi Covid-19, dokumen monitoring dan evaluasi program bantuan dari Ditjen PDSPKP KKP dan dokumen koordinasi pemanfaatan teknologi iradiasi dalam rangka menjaga kualitas ekspor produk kp serta pemenuhan persyaratan mutu dari negara buyer.

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, Indeks Kesehatan Laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan dan pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Target IKU tersebut berasal dari rata-rata nilai capaian Jumlah RZ, capaian Nilai IKLI dan Capaian Luas Kawasan Konservasi. Detil target pada IKU ini secara matematis adalah sebagai berikut (detil target berasal dari Dokumen RKP 2022) :

- Target Jumlah RZ pada Tahun 2022 adalah 22 RZ
- Target Nilai IKLI pada Tahun 2022 adalah 76
- Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 25,1 Juta Ha

Progres yang telah dicapai pada Triwulan II terkait target jumlah RZ pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2022 telah ditetapkan 6 Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZKAW) sehingga hingga saat ini telah terbit 7 Perpres RZKAW:
 - Perpres No. 83 Tahun 2020 tentang RZKAW Selat Makassar ditetapkan tanggal 24 Juli 2020.
 - Perpres No. 3 Tahun 2022 tentang RZKAW Laut Jawa ditetapkan tanggal 5 Januari 2022
 - Perpres No. 4 Tahun 2022 tentang RZKAW Laut Sulawesi ditetapkan tanggal 5 Januari 2022
 - Perpres No. 5 Tahun 2022 tentang RZKAW Teluk Tomini ditetapkan tanggal 5 Januari 2022
 - Perpres No. 6 Tahun 2022 tentang RZKAW Teluk Bone ditetapkan tanggal 5 Januari 2022
 - Perpres No. 40 Tahun 2022 tentang RZKAW Laut Maluku ditetapkan tanggal 17 Maret 2022
 - Perpres No. 41 Tahun 2022 tentang RZKAW Laut Natuna dan Natuna Utara ditetapkan tanggal 17 Maret 2022

Tabel 7. Catatan terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores

No.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores	Pasal Acuan	Keterangan
1.	Pasal 37 ayat 2 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk Taman Nasional Komodo.	Pasal 37 ayat 1 Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berupa Kawasan Lindung.	Nomenklatur "huruf" pada Pasal 37 ayat 2 harap dihapuskan, karena pada Pasal 37 ayat 1 yang diacu tidak mencatumkan huruf yang dimaksud.

Tabel 6. Catatan terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka

No.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka	Pasal Acuan	Keterangan
1.	Pasal 9 ayat (6) Strategi untuk pengembangan PPKT di Selat Malaka sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:	Pasal 9 ayat (1) huruf f -	Pasal 9 ayat (6) seharusnya mengacu pada ayat (1) huruf e e. pengembangan PPKT di Selat Malaka sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara
2.	Pasal 10 ayat (6) Strategi untuk optimalisasi bagan pemisah lalu lintas sesuai ketentuan hukum/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:	Pasal 10 ayat (1) huruf f -	Pasal 10 ayat (6) seharusnya mengacu pada ayat (1) huruf e e. optimalisasi dan pengelolaan bagan pemisah lalu lintas sesuai ketentuan hukum/perjanjian internasional; dan
3.	Pasal 36 ayat (3) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pasal 36 ayat (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi: a. KSN dari sudut kepentingan ekonomi; dan	Pasal 36 ayat (3) seharusnya mengacu pada ayat (1) huruf b.
		b. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.	
4.	Pasal 37 ayat (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:	Pasal 37 ayat (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berupa Kawasan Budi Daya.	Kata "huruf" pada Pasal 37 ayat (2) agar dihapuskan, karena pada Pasal 37 ayat (1) yang diacu tidak mencatumkan huruf yang dimaksud.

Progres yang telah dicapai pada Triwulan II terkait pengelolaan IKLI pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pengukuran IKLI akan dilakukan pada akhir tahun. Saat ini, Kemenko Marves mendorong provinsi untuk dapat memasukan pengukuran IKLI pada renstra masing-masing provinsi. Kebijakan Kelautan Indonesia dan IKLI disosialisasikan bersamaan dengan momen sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Provinsi. Hingga Juni 2022, telah dilakukan sosialisasi

Progres yang telah dicapai terkait capaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Bersama BRIN dan institusi serta stakeholder kelautan dan perikanan telah membentuk Jejaring Pemantauan Ekosistem Pesisir Indonesia untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir pada 20 Mei 2022 yang dilanjutkan dengan pembahasan Grand Design pada 10-12 Juni 2022 di Bandung dan Pertemuan Tindak Lanjut Pembentukan Jejaring di Bogor pada 30 Juni-2 Juli 2022
 - Telah berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan World Economic Forum 2022 di Davos, Swiss terkait Blue Economy dan pertemuan UN Ocean Conference pada tanggal 27 Juni-2 Juli di Lisbon terkait Payment For Ecosystem Services (PES) untuk area konservasi laut, restorasi terumbu karang serta Blue Carbon dan Blue Economy.
 - Perihal Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) 2022 telah disampaikan Draf Finalisasi Juknis Penenggelaman Kapal Eks KRI oleh TNI AL, Pemda Buleleng bersurat ke TNI AL terkait permohonan hibah eks KRI untuk ditenggelamkan dan dijadikan sebagai terumbu karang buatan dan telah dilakukan pertemuan dengan MARS dan MARS bersedia jika metodenya digunakan dalam ICRG serta MARS bersedia melakukan pelatihan kepada stakeholder terkait
 - Telah dilakukan pembahasan kerjasama Indonesia Jerman terkait terumbu karang dan rapat koordinasi teknis membahas peninjauan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi
4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan***

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2021 yaitu 8,08 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2022 yaitu 8,88 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 106,79 pada tahun 2022 menjadi 104-106 sesuai dengan target RKP 2022.

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah telah dilakukan penyusunan Perpres Ekonomi Biru untuk mendukung program Blue Halo S dan sedang dilakukan

penelaahan oleh pakar, kemudian direncanakan akan dilakukan kunjungan ke lokasi pilot project Blue Halo S di Nias dan serta telah dilakukan pengawalan kebijakan penangkapan ikan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada bidang perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial. Hal lainnya yang telah dilaksanakan adalah telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan sebagai dorongan peningkatan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan produksi perikanan tangkap.

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang optimal adalah kondisi dimana produksi perikanan budidaya Tahun 2021 sebesar 16,39 Juta Ton perlu dikembangkan menjadi 20,49 Juta Ton terdiri dari produksi Ikan sebesar 8,69 Juta Ton dan produksi rumput laut sebesar 11,8 Juta Ton (Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP 2022).

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Tahun 2022-2024 yang telah disahkan didalam SK Pokjanas Kemenko Marves dalam hal ini akan dijadikan acuan bersama pada program Akselerasi Industrialisasi Udang Nasional.

Sebagai tindak lanjut sebagaimana arahan Ketua Tim Pokja yakni Bapak Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, terdapat dua hal yang perlu segera ditindaklanjuti:

- Pertama, isu terkait pendanaan (KUR) dan perijinan perlu dilakukan pembahasan lebih detail didalam pokja supaya penanganannya lebih terencana dan komprehensif, serta ada plan of action yang clear.
- Kedua, working grup yang telah dibentuk dimohon agar mulai rutin melakukan pertemuan, perlu segera identifikasi isu yang terkait dimasing - masing grup tersebut dan bisa segera membuat plan of actionnya, agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan lebih komprehensif;

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan prasarana logistik, peningkatan mutu serta pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing. Kondisi yang berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana tercapainya target ekspor hasil perikanan sesuai target pada RKP 2022 dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk.

Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mencapai nilai ekspor hasil perikanan dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk sesuai target pada RKP 2022. Berdasarkan Dokumen RKP Tahun 2022, target nilai ekspor perikanan pada Tahun 2022 adalah sebesar 7,13 US\$ Miliar.

Dalam rangka mendukung capaian nilai ekspor perikanan Tahun 2022 hal-hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Telah melakukan Bilateral Meeting Ke-14 antara GACC dan BKIPM KKP tanggal 7 Juni 2022 dalam rangka Upaya Penanganan Kasus Penolakan UPI yang ternotifikasi Covid-

19. dari hasil Bilateral Meeting tersebut, disimpulkan bahwa ada beberapa UPI belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan belum menanggapi arahan yang diberikan oleh GACC. tindak lanjut dari kegiatan ini adalah BKIPM akan melakukan pendampingan terhadap UPI yang ternotifikasi GACC dan akan membuat kajian arahan yang diberikan oleh GACC untuk menjadi panduan.

- Telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan dari Ditjen. PDSPKP KKP dan Kegiatan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan di Kab. Sukabumi, Kab. Sampang, dan Kab. Subang
- Telah dilaksanakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam rangka Menjaga Kualitas Ekspor Produk KP serta Pemenuhan Persyaratan Mutu dari Negara Buyer. Progres saat ini Bapak Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah bersurat kepada Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) nomor B-692/D2/MARVES/DM.04.00/VI/2022 tanggal 23 Juni 2021 perihal Pembuatan Feasibility Study terkait Rencana Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam rangka menjaga kualitas ekspor Produk Kelautan Perikanan. direncanakan akan mendorong pengembangan teknologi iradiasi di Surabaya, Belawan-Medan, Bitung-Manado.

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya adalah kondisi dimana adanya pengembangan industri penghasil bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir) di sektor industri kelautan, perikanan, dan penunjangnya.

Kondisi yang Berkelanjutan adalah suatu capaian akumulatif dari capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah hasil riset yang

dimanfaatkan industri kelautan dan perikanan Tahun 2022 dengan berorientasi antara lain pada kelestarian lingkungan hidup, partisipasi publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan adalah kondisi dimana tercapainya persentase capaian akumulatif dalam capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, partisipasi public dan pertumbuhan ekonomi.

Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi pergaraman nasional 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Dalam capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi pergaraman nasional 2022, pada Triwulan II hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Telah terbit sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB) dengan No Sertifikat PW-S.01.04.1.3.332.06.22-0069 tanggal 29 Juni 2022 untuk Garam Farmasi Natrium Klorida PT Karya Daya Syafarmasi.

- Dalam capaian pelaku atau kelompok usaha yang terfasilitasi Tahun 2022, pada Triwulan II hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:
 - Telah terbit sertifikat TKDN kincir air 1 phase buatan dalam negeri produksi PT Barata bekerja sama dengan Poltek KP Sidoarjo dengan Nomor Tanda Sah: 6199/SJ-IND.8/TKDN /7/2021 dengan nilai 40.15%
 - Telah terbit sertifikat SNI produk kincir air 1 phase produksi PT Barata Indonesia dengan No. Sertifikat: PCS 01078.01

- Telah terbit TKDN produk kincir air 1 phase produksi PT Om Whahaha dengan No. Sertifikat: 2013/SJ-IND.8/TKDN/6/2022
- Telah terbit TKDN produk kincir air 3 phase produksi PT Om Whahaha dengan No. Sertifikat: 471/SJ-IND.8/TKDN/3/2022
- Telah terbangun prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton serta 20 dan 40 feet produksi PT INKA (Persero) dan dalam proses pengujian sertifikasi SNI dan TKDN oleh LSPro.
- Dalam capaian jumlah riset yang dimanfaatkan industri KP Tahun 2022, pada Triwulan II hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:
Draft awal Implementing Arrangement (IA) ODA Project Pemanfaatan Satelit ini telah diperoleh dari pihak KHOA, dan sedang dalam pembahasan antara MTCRC dan internal Marves. Rujukan IA ini adalah MoU kerjasama bidang kemaritiman antara Indonesia dan Korea tahun 2016, dan IA Pembentukan lembaga MTCRC tahun 2018.

3.1.3 Internal Business Perspective

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2022 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan kebijakan pada TW II Tahun 2022 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Pada penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang, progres persentase yang telah dicapai adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah dokumen koordinasi dengan PUPR, KKP dan Pemda terkait integrasi sektor perikanan kedalam komisi irigasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dokumen pengawalaan penataan kawasan

pertambakan rakyat melalui penyusunan DED kawasan dan revitalisasi irigasi tambak untuk Kabupaten Pinrang, Lampung Selatan, Sukamara dan Aceh Timur sebagai basis revitalisasi tambak rakyat (DED sudah selesai disusun dan disosialisasikan melalui FGD) dan dokumen koordinasi dan pendampingan revitalisasi tambak tradisional plus di Sidoarjo dan Gresik Jawa Timur sebagai basis produksi udang untuk pemenuhan pasar udang premium. Sebagai tambahan informasi, pembangunan *shrimp estate* di Kebumen saat ini tahapannya baru mencapai 7% (progres dalam tahapan pengerukan lahan).

Atas dasar output antara yang telah dijelaskan tersebut, pelaksanaan yang telah dicapai dalam mendukung progres penyusunan rancangan kebijakan tersebut di TW II Tahun 2022 adalah rapat pembahasan KUR maritim untuk mendukung transformasi ekonomi pedesaan, diskusi optimalisasi kur perikanan, rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak dan pengembangan tambak tradisional plus di Kota Surabaya, pelaksanaan kunjungan lapangan dan koordinasi dalam rangka program revitalisasi irigasi pertambakan di Provinsi Jawa Timur dan koordinasi dan peninjauan lapangan *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Pada pelaksanaan rapat pembahasan KUR maritim untuk mendukung transformasi ekonomi pedesaan, pokok bahasan rapat yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Realisasi KUR di sektor Perikanan relative jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan realisasi KUR di sektor Pertanian. Salah satu persoalan utamanya yakni regulasi yang secara khusus mengatur dukungan penuh untuk KUR untuk sektor perikanan belum tersedia. Selama ini KUR diatur oleh Permenko yang dikeluarkan oleh Kemenko Ekon, untuk itu diusulkan agar terkait KUR Perikanan, regulasinya dikeluarkan melalui Permenko Kemenko Marves;
- Kendala penyaluran dari sisi perbankan yang perlu dibenahi regulasinya yakni terkait kolateral. Usaha di sektor perikan umumnya minim status kepemilikan aset baik itu terkait sertifikat lahan ataupun sertifikat kapal, untuk itu kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi;



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat

- KUR disektor UMKM Produksi lebih banyak sosialisasi terkait pertanian, masih minim campaign terkait KUR Perikanan;
- Salah satu model bisnis yang bisa dirujuk untuk meningkatkan realisasi KUR Perikanan dan meningkatkan kepercayaan perbankan yakni melalui skema Bisnis Kemitraan antara Petani Ikan dan Offtaker. Dalam hal ini, pihak yang bertugas sebagai pemberi jaminan adalah oftaker;
- Kementerian terkait telah mengeluarkan juknis yang mengatur tentang KUR Perikanan namun selama ini implementasinya di lapangan masih lemah;
- Selama ini KUR Perikanan penerimanya dalam bentuk kelompok, berbeda dengan KUR di sektor Pertanian yang mana penerimanya lebih banyak perorangan. Untuk itu kedepan perlu didorong dan disusun kebijakan terkait hal ini agar KUR Perikanan lebih banyak disalurkan untuk perorangan. KUR dengan penerima kelompok dinilai belum bisa menyelesaikan persoalan peningkatan taraf hidup masyarakat (perorangan);
- Skema kemitraan bisnis dan kredit dengan BUMDES sebagai oftaker dinilai mampu memutus rantai tengkulak;
- Tiga sub sektor di sektor Perikanan yang berpotensi untuk didorong sebagai penerima KUR yakni Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan;
- Perlu dipahami bahwa Perbankan tidak hanya mempermasalahkan terkait kolateral, namun keberlanjutan usaha juga menjadi pertimbangan utama. Untuk itu skema kemitraan dalam hal ini sangat diperlukan, semisal kemitraan antara pembudidaya/nelayan dengan pengolahan, dengan begitu akan ada keberlanjutan usaha dan kepastian pembayaran pokok kredit. Karena selama ini usaha di sektor perikanan budidaya dan penangkapan sangat bergantung musim dan lama masa tanam (untuk budidaya), untuk itu diperoleh unit pengolahan yang mampu melakukan usaha pengolahan setiap saat;

Kesimpulan dan tindak lanjut dari capaian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Akan segera dibentuk tim dilintas keasdepan Kedeputusan Sumber Daya Maritim untuk mengkaji regulasi KUR dan menyusun plan of action pilot project dukungan Perbankan untuk KUR Perikanan, dalam hal ini yakni project upscaling pertambahan rakyat;

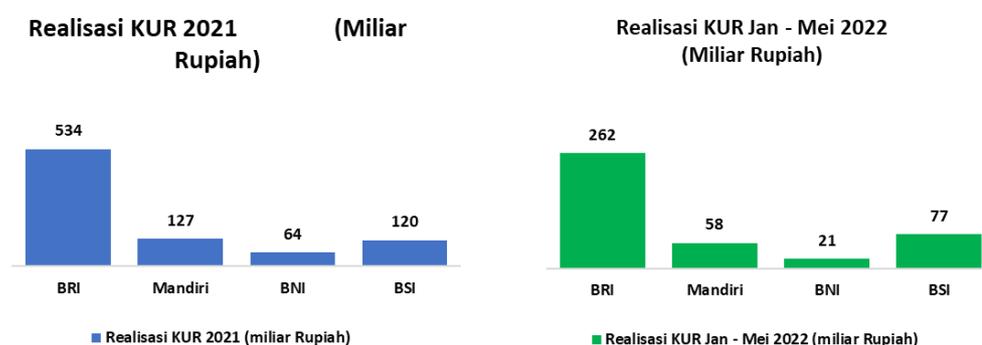
- KUR untuk sektor produksi UMKM (Pertanian dan Perikanan) masih merujuk pada Permenko Ekon, untuk itu akan dilakukan kajian lebih lanjut terkait regulasi tersebut.
- Akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang stakeholder perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui preferensi perbankan yang memungkinkan untuk meningkatkan realisasi KUR di sektor Perikanan

Kemudian pada pelaksanaan diskusi optimalisasi kur perikanan, pokok bahasan rapat yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Bank BRI menjadi bank penyalur KUR disektor perikanan terbesar dibandingkan Bank BUMN lain untuk regional Jawa Timur. Selain itu ditingkat Nasional, BRI Regional Jawa Timur juga menjadi penyalur KUR di sektor perikanan terbesar jika dibandingkan dengan BRI regional lain se Indonesia. Namun secara umum, porsi KUR perikanan hanya \pm 1-2% dari keseluruhan portofolio masing – masing perbankan;
- Laporan dari ATINA (Perusahaan eksportir Udang) terkait penyaluran KUR di Provinsi Jawa Timur, kondisi yang terjadi masih banyak kendala dilapangan dan butuh dukungan kebijakan dari pusat. Sebagai catatan, dari 1300 petani yang dibina oleh ATINA, hanya 5 petani yang lolos pencairan. Tiga persoalan utama yang terjadi dilapangan yakni
 - Informasi terkait KUR masih sangat minim, dalam hal ini ATINA sudah membentuk tim teknis untuk membantu proses diseminasi informasi;
 - Bank penyalur masih mempersyaratkan agunan sekalipun untuk KUR mikro, seharusnya hal ini bertolak belakang dengan aturan yang ada.
 - Bank penyalur juga terkesan tidak tertarik, respon dilapangan terhadap pengajuan oleh petani masih sangat kurang.
- Wakil ketua APDESI menyampaikan bahwa political will pihak perbankan dalam hal ini sangat dibutuhkan segera. Jika perbankan masih sulit berkolaborasi, Pemerintah bisa langsung berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selama ini yang terjadi, jika Bank Indonesia ikut melakukan intervensi kebijakan maka implementasinya bisa lebih efektif. Selain itu tata kelola usaha perikanan juga perlu ditingkatkan, skema integrasi antara Hulu – Hilir petani dan offtaker harus mulai dimasivekan;
- Regional CEO BRI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tata kelola usaha disektor perikanan masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, di sektor pertanian integrasi hulu – hilir usaha sudah banyak dilakukan, berbeda dengan sektor perikanan yang cenderung belum terintegrasi dan masih terbiasa berjalan sendiri. Gap tersebut menjadi poin krusial sebagai pertimbangan penyaluran kredit oleh perbankan;
- Penyaluran kredit di sektor Perikanan secara umum telah lama dijalankan oleh Perbankan, berbagai macam kondisi telah dilalui. 2 hal yang perlu ditingkatkan oleh Pembudidaya agar Perbankan lebih confidence untuk menyalurkan KUR yaitu kesinambungan panen harus dibenahi agar cash flow lebih teratur dan manajemen pemeliharaan perlu disempurnakan agar tidak terjadi kematian massal;
- Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh ATINA, BRI regional Jawa Timur akan membentuk tim khusus untuk membantu optimalisasi penyaluran KUR kepada petambak – petambak binaan ATINA baik yang ada di Kabupaten Sidoarjo maupun yang ada di Gresik. Bank BRI dalam hal ini juga akan menggandeng Pemda Jawa Timur;
- Ketua Asosiasi FUI menyampaikan bahwa dukungan KUR sangat krusial khususnya untuk scale up usaha para pembudidaya tradisional, karena kedepan baik Pemerintah ataupun asosiasi menargetkan agar para pembudidaya tersebut bisa naik kelas. Selain itu, kekhawatiran pihak Perbankan terkait fenomena gagal panen akibat outbreak penyakit, sebagai informasi dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah terjadi lagi fenomena tersebut. Disamping itu, kebanyakan pembudidaya tradisional juga menjalankan sistem pemeliharaan polikultur (budidaya ikan dan udang sekaligus dalam satu kolam yang sama), nantinya hasil panen ikan bisa dimanfaatkan untuk mendukung cash flow kas para pembudidaya;
- Direktur Usaha dan Investasi KKP menyampaikan bahwa kebanyakan pembudidaya atau nelayan nasional masih bersifat tradisional, harapannya dari perbankan bisa memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Hal ini akan sangat membantu, mengingat pembayaran pokok pinjaman perbankan meliputi bunga dan asuransi;
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa penandatanganan PKS antara DKP Pemprov Jatim dan Perbankan BUMN yang telah diselenggarakan pada pertengahan Juni 2022 merupakan langkah awal untuk memperkuat kolaborasi kedua belah pihak. Untuk itu, kedepan akan dilakukan

pertemuan teknis untuk membahas program – program konkrit yang bisa dikerjakan bersama. Skema yang akan dijalankan harus bisa menguntungkan semua pihak;



Gambar 4. Perbandingan Realisasi KUR 2021 dan 2022

Sebagai tindaklanjut dari capaian pembahasan tersebut, maka perlu dilakukan pendalaman dengan masing – masing perbankan untuk membahas skema pilot project yang akan dikerjakan di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini lokus yang dipilih akan tersebar di beberapa lokasi mengikuti program masing – masing perbankan yang sudah berjalan, nantinya Pemprov Jawa Timur, Asosiasi dan Off taker setempat akan turut dilibatkan;

Dalam rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak dan pengembangan tambak tradisional plus di Kota Surabaya disepakati bahwa sektor kelautan dan perikanan masih memungkinkan untuk diintegrasikan dalam Komisi Irigasi. Hal ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Rapat

Dukungan dan komitmen daerah untuk memberikan afirmasi program kepada sektor pertambakan dan perikanan sangat dibutuhkan. Jawa Timur adalah lokasi prioritas *major project*, sehingga integrasi sektor kelautan dan perikanan dalam komisi irigasi mutlak dibutuhkan. Tindak lanjut dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- Pengembangan tambak tradisional plus di Sidoarjo akan dibahas lebih lanjut, khususnya dalam hal detailing dukungan program dan keterlibatan sektor – sektor lain. Percontohan ini harus dikonkritkan sebagai success story bukan hanya wacana, sehingga bisa dicopy ditempat lain.

- Pada rapat selanjutnya, akan dibahas revitalisasi tambak untuk udang windu sebagai bagian dari program revitalisasi tambak, karena windu ini komoditas penting di Jawa Timur.
- FUI diharapkan bisa segera menyelesaikan SOP tradisional plus. Tinggal selanjutnya dikembangkan pelatihan SDMnya, pihak yang akan melakukan pelatihan dan pendampingan nanti akan dibahas lebih lanjut dengan BRSDMKP dan dinas terkait.
- Bappeda, mohon ada atensi pembiayaan untuk irigasi pertambakan kedepannya, karena untuk bangun tambak, ketersediaan irigasi ini sangat wajib karena perannya sangat vital.

Dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dan koordinasi dalam rangka program revitalisasi irigasi pertambakan di Provinsi Jawa Timur hal-hal yang dibahas adalah pembahasan draft naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara dinas kelautan dan perikanan provinsi Jawa Timur dengan stakeholder terkait untuk mendukung program peningkatan produksi udang di Provinsi Jawa Timur dan updating progres rencana revitalisasi saluran irigasi pertambakan di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rapat

Perihal pembahasan draft naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan stakeholder terkait untuk mendukung program peningkatan produksi udang di Provinsi Jawa Timur, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Pokok utama agenda rapat yakni terkait pembahasan draft rencana kerjasama. Stakeholder yang diundang untuk bergabung dalam rencana kerjasama ini meliputi kalangan pemerintahan, akademisi, asosiasi dan perbankan.
- Rencana kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengenyot kembali produksi udang windu.

- DKP Jatim memiliki rencana untuk mengembangkan sistem digitalisasi pesisir. Untuk itu Pemda dalam hal ini akan mengundang pihak akademisi khususnya pakar dalam hal teknologi informasi untuk ikut bekerja bersama.
- Akademisi yang turut diundang untuk ikut terlibat, selain untuk membangun sistem, Pemda juga mengharapkan kontribusinya melalui pelibatan mahasiswa dalam setiap sosialisasi kegiatan Pemda yang terkait dengan peningkatan sdm dan produktivitas usaha pertambakan;
- Permodalan memiliki peran yang penting, untuk itu Pemda mengundang Perbankan BUMN untuk ikut terlibat dalam program ini. Instrumen KUR sangat diharapkan untuk bisa diakses lebih banyak oleh pembudidaya. Dalam kegiatan ini Perwakilan Bank Mandiri menilai bahwa program ini sangat bagus, untuk itu siap terlibat dan ikut bekerjasama dalam pembangunan kedepannya;
- Dari asosiasi menyampaikan siap mendukung kegiatan ini, namun agar diperhatikan juga bahwa sebaiknya komoditas vaname tidak dilupakan juga, karena tidak semua wilayah cocok untuk budidaya udang windu. Selain itu dari asosiasi juga siap melakukan pendampingan, dalam hal ini pendampingan yang dilakukan akan berbasis avlue chain artinya tidak hanya dilakukan untuk pembudidaya, namun pengepul dan pengolahan juga akan didampingi, agar produk yang dihasilkan tetap optimal dari hulu ke hilir;
- Kepala DKP Kabupaten Jawa Timur menyampaikan agar PKS ini lebih konkrit aksinya dilapangan;
- Perwakilan dari Dir. KKI KKP menyampaikan sangat mengapresiasi program ini, karena diantara dinas ditingkat nasional hanya Jawa Timur yang tindak lanjutnya sangat progresive. Kedepan KKP siap bekerjasama dalam program ini;
- Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyampaikan bahwa dukungan setiap stakeholder sangat penting. Kedepan diharapkan kegiatan ini tidak selesai hanya sampai di seremonial penandatanganan pks, namun aksi konkritnya justru lebih dibutuhkan;

Kemudian terkait updating progres rencana revitalisasi saluran irigasi pertambakan di Provisi Jawa Timur, hasil kesepakatan yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Stakeholder Perikanan yang akan masuk kedalam komisi irigasi, diantaranya Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Perwakilan Dinas Perikanan

Kabupaten Gresik, Perwakilan POKLINA Kabupaten Gresik, dan Perwakilan POKLINA Kabupaten Sidoarjo;

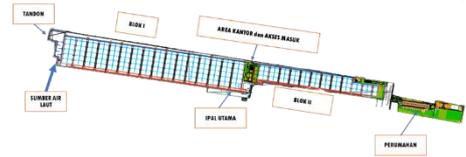
- Agar normalisasi irigasi pertambahan udang di Kab. Sidoarjo dan Kab. Gresik bisa segera masuk didalam perencanaan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, untuk itu diharapkan Pemerintah daerah yang terlibat segera menyiapkan usulan.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Usulan untuk menugaskan 5 perwakilan dari stakeholder perikanan kedalam Komisi Irigasi Provinsi Jawa Timur, mohon untuk bisa diakomodasi. Untuk sidang pleno yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, dimohon untuk bisa mengundang stakeholder perikanan tersebut. Sedangkan untuk SK pengesahan diharapkan bisa segera disahkan secepatnya;
- Surat usulan Bupati dan Gubernur kepada Kementerian PUPR mohon bisa segera dikirimkan agar ada afirmasi kebijakan dari pusat;
- Menindaklanjuti hasil rapat ini, dalam waktu dekat akan diadakan rapat koordinasi lanjutan dengan pokok bahasan terkait kondisi terkini muara sungai di Kab. Sidoarjo sebagaimana hasil survey dari tim Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. Dari pihak BBWS Brantas diharapkan juga bisa memberikan assessment terkait hasil survey tersebut;
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga akan menginisiasi FGD terkait normalisasi muara yang berkelanjutan dengan mengundang pihak dari KKP, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Dinas PU SDA;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan, dimohon untuk bisa mengaktifkan kembali POKLINA yang ada di Kab. Sidoarjo;

Pada pelaksanaan koordinasi dan peninjauan lapangan *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah info yang didapat adalah sebagai berikut:

- Saat ini progres pembangunan baru mencapai 7%. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor lapangan baru pada tahapan penyelesaian pembersihan lahan dan pengurukan lahan. Belum ada petak tambak yang terbangun (target petakan sebanyak 149 petak);
- Terdapat perubahan luasan lahan pembangunan, desain semula seluas 100 Ha



Gambar 7. Semula Menjadi Desain Konstruksi Shrimp Estate

yang terdiri dari area tendon, 2 blok petak pemeliharaan, ipal, area perkantoran dan perumahan. Namun, akibat automatic adjustment dan pengurangan anggaran, luasan yang dikerjakan berubah menjadi 70 Ha. Petak pemeliharaan



Gambar 8. Dokumentasi Drone Progres Pembangunan

yang semula terdiri dari 2 blok, dilakukan pengurangan sehingga hanya menjadi 1 blok;

- Lahan yang digunakan adalah lahan milik Pemda Kebumen. Saat ini status clean and clear lahan sudah tidak ada persoalan. Tata ruang juga sudah sesuai peruntukan semua;

Persoalan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Apabila merujuk dari DED yang sudah disusun oleh kontraktor desain, jenis pompa yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam hal ini Pihak kontraktor konstruksi telah berkonsultasi dengan pihak KKP dan Kontraktor desain, telah disepakati untuk dilakukan penyesuaian spesifikasi pompa;
- Diwilayah yang akan dibangun area peta tambak masih ada tambak eksisting milik masyarakat. Info dari Pemda, pertambak tersebut statusnya illegal karena dibangun dilahan milik Pemda dan tidak memiliki surat izin. Dalam hal ini Pemda

sudah melakukan sosialisasi, dalam waktu dekat pertambakan tersebut akan stop beroperasi dan pindah lokasi;

- Desain DED awal, apabila disesuaikan dengan kondisi lapangan, terjadi irisan antara petakan tandon dengan jalan lintas selatan, dalam hal ini antara KKP dan Konsultan Kontraktor sepakat untuk melakukan penyesuaian desain dengan kondisi lapangan;

Usulan yang disampaikan oleh Pihak Pemda Kebumen adalah sebagai berikut:

- Masyarakat setempat memohon agar ada upaya mitigasi resiko terhadap kemungkinan bencana tsunami. Untuk itu, memohon kepada pihak pusat selain membangun area pertambakan, dimohon juga untuk membuat green belt. (Tanggapan dari KKP, jika area tambak sudah selesai akan dibuat green belt sepanjang 4 Km dengan vegetasi berupa cemara laut. Kegiatan tersebut akan difasilitasi oleh Dirjen PRL);
- Pihak Pemda kekurangan tenaga terampil yang bisa ditugaskan sebagai petambak teknis. Untuk itu memohon kepada Pemerintah pusat agar ada dukungan peningkatan kapasitas SDM untuk masyarakat setempat;

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pihak KKP diharapkan bisa segera mulai melakukan penanaman green belt, mengingat vegetasi yang akan ditanam butuh waktu yang relatif lama untuk tumbuh;
- Pihak KKP diharapkan bisa memfasilitasi untuk peningkatan kapabilitas SDM setempat;
- Setiap dilakukan adendum desain ataupun spesifikasi alat akibat adjustment dengan kondisi di lapangan, sebaiknya dilengkapi dengan legalitas (persuratan) yang jelas;

b) Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan

Pada penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan, progres persentase yang telah dicapai adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah dokumen koordinasi dalam rangka mendukung percepatan kerjasama antara pihak swasta dengan lembaga riset SEAMEO BIOTROP Indonesia untuk pmebangunan kultur jaringan rumput di tingkat lokal (dokumen kerjasama kelembagaan sedang tertunda di Kemendikbud) dan telah dilakukan penetapan

Kabupaten Maluku Tenggara sebagai kampung budidaya rumput laut (*seaweed cluster*) oleh KKP (Kepmen KP No.16 Tahun 2022).

Pada diskusi SEAMEO BIOTROP, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Rencana kerjasama pengembangan di Kei Island Maluku Tenggara, dimana Kemendikbud mengembangkan kerjasama riset.
- Kemendikbud mengawal kerjasama riset dan memastikan kerjasama dan kepastian dari Perpres nya, hambatan dan persepektif dari Kemendikbud mengayom Biotrop dan posisi KKP dalam kerjasama.
- Dari Biotrop bertujuan untuk mentransfer teknologi rumput laut dan bisa di adaptasi swasta
- Biotrop sudah menyusun surat kerjasama, tinggal menunggu diterima oleh Kemendikbud, serta Draf MOU sudah diproses ND dan surat kuasa.
- Dari Kemendikbud menyampaikan bahwa surat kuasa sedang diproses, berdasarkan peraturan diketahui sedang ditelaah di bagian Biro Hukum.
- Lokasi pengembangan kebun bibit rumput laut sudah dimasukkan kedalam program seaweed estate dan diharapkan komitmen lokasi awal.
- Lokus ditentukan berdasarkan kualitas air BBPBL sudah meninjau lokasi tanah tersebut merupakan tanah Pemda.
- Kerjasama ini sangat kontributif untuk membuat kebun bibit harus memadai (BBPBL Ambon) untuk rumput laut di Maltra program kampung budidaya sudah ditinjau untuk lokasi kultur jaringan ada tiga lokasi yang sudah disetujui.
- Terkait benih menjadi poin penting dan banyak hambatan.

Tindak lanjut atas dari hasil kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kemenko Marves memfasilitasi dan mendorong karena dibutuhkan kesepakatan pematangan rencana kerjasama untuk menyamakan persepsi.
- Diperlukan kunjungan teknis untuk penetapan lokasi Laboratorium dan kebun bibit untuk laporan ke Pak Deputi.

Lalu berikutnya, sebagai progres lanjutan penyusunan rancangan kebijakan tersebut di TW II, kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah peninjauan calon lokasi pendirian laboratorium kultur jaringan di Kabupaten Maluku Tenggara. Telah dilakukan identifikasi lokasi pada Desa Sathean dan Desa Letman. Kriteria calon lokasi



Gambar 9. Dokumentasi Kunjungan Lapangan

laboratorium kultur jaringan adalah sebagai berikut:

- Lokasi laboratorium ini berada di Desa Debut dan Lairngenges dan berjarak dari jalan utama sekitar ± 5 km.
- Kondisi jalan menuju laboratorium kecil dan belum beraspal
- Pada lokasi ini sudah ada bangunan berdiri yang dahulu merupakan kantor balai kawasan konservasi.
- Luasan lokasi ini sekitar 5 Ha dan sudah dibebaskan sebesar 3 Ha dengan status lahan milik pemerintah daerah
- Kondisi sekitar bangunan masih banyak pepohonan dan semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan sekitar bangunan agar lebih terlihat tertata.
- Jarak bangunan ke arah pantai ± 100 meter sehingga ada lokasi yg bisa dijadikan kebun bibitnya
- Jarak calon lokasi labortorium ke daerah kebun bibit eksisting dan kampung budidaya sebgai berikut:
 - Calon lokasi labortorium – Sathean : ± 19 km
 - Calon lokasi labortorium – Letman : ± 21 km
 - Calon lokasi labortorium – Letvuan : ± 7 km

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Kurangnya tenaga kerja untuk melakukan penanaman rumput laut. Saat ini pembudidaya rumput laut di daerah Maluku Tenggara kurang dari 2000 orang. Target dari pemerintah yaitu 10.000 orang untuk bisa mencapai produktivitas 2000 ton.
- Ketersediaan bibit kultur jaringan berada di Ambon sehingga menyebabkan cost operasional yang membengkak.

Usulan tindak lanjut atas dasar informasi yang telah disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian zonasi terkait RT RW kawasan wilayah yang berpotensi menjadi kebun bibit supaya tidak terjadi permasalahan yang akan datang..
- Pemberian Bibit dan Peresmian Bangunan Laboratorium Pada Bulan Agustus atau paling lama bulan oktober. Pembiayaan untuk bangunan Laboratorium oleh pihak ketiga.
- Mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah untuk mencapai target pembudidaya rumput laut sebesar 10.000 orang.

c) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer, pada TW II ini persentase capaiannya adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah dokumen koordinasi pembahasan pembuatan FS dengan BRIN sebagai bentuk tindak lanjut Rakor, Kunlap dan surat Deputi kepada Kepala BRIN, terkait rencana pembangunan unit Iradiator di 3 lokasi Pelabuhan Perikanan Strategis (Surabaya, Bitung, Belawan). Dengan dibuatnya FS ini diharapkan akan dapat memberikan masukan terkait penggunaan teknologi yang tepat guna dalam upaya menjaga kualitas ekspor produk KP dan pemenuhan persyaratan mutu ekspor negara buyer.

Pada rapat koordinasi pemanfaatan teknologi iradiasi dalam upaya menjaga kualitas ekspor produk kelautan dan perikanan serta pemenuhan persyaratan mutu negara buyer dijelaskan bahwa teknologi iradiasi merupakan metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik pathogen. Prinsip iradiasi pada produk perikanan adalah tidak ditujukan untuk memperbaiki mutu dan keamanan hasil perikanan tetapi lebih kepada untuk inaktivasi bakteri vegetatif patogen serta dapat memperpanjang masa simpan. Dari kegiatan rapat tersebut perlu adanya perhitungan tekno-ekonomi terkait penerapan teknologi iradiasi, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait implementasi iradiasi, adanya data terkait unit pengolahan ikan yang produknya

dilakukan iradiasi, penentuan otoritas kompeten yang mengendalikan teknologi iradiasi, penambahan jumlah produk pangan iradiasi yang ber-SNI dan kolaborasi lebih lanjut di tingkat K/L karena teknologi iradiasi tidak hanya diperuntukan untuk produk kelautan dan perikanan tetapi juga dapat diaplikasikan untuk produk pangan lainnya.



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Rapat

Berikutnya dilaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan teknologi iradiasi untuk produk kelautan dan perikanan yang disampaikan bahwa nilai ekspor produk KP meningkat sebesar 25,41%. Tantangan bagi sosialisasi teknologi iradiasi adalah meyakinkan masyarakat bahwa teknologi ini aman untuk digunakan. Dalam pemanfaatan teknologi iradiasi perlu adanya manajemen risiko/*risk management*. Sejauh ini, pemanfaatan teknologi iradiasi telah diterapkan pada rempah-rempah, bumbu-bumbu dan sayuran kering. Secara umum permasalahan yang

dihadapi berdasarkan dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Saat ini kebutuhan bahan radioaktif didapat melalui impor sehingga diperlukan Riset untuk pengkajian pembuatan bahan radioaktif sendiri agar tidak tergantung pada negara lain.
- Jumlah produk pangan iradiasi baru 3 yang memiliki SNI sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk penerbitan SNI produk-produk pangan iradiasi baru.
- Belum ada kajian secara konkrit terkait dengan implementasi pemanfaatan teknologi Iradiasi.

Saran dan rekomendasi yang diberikan dari K/L terkait pada rapat ini adalah sebagai berikut:

- Perlunya ada konfirmasi kemampuan teknologi iradiasi;
- Bila teknologi ini akhirnya dimanfaatkan, maka perlu adanya fasilitas pendukung agar semua aspeknya dapat berjalan dengan baik;
- Perlunya payung hukum yang menaungi teknologi ini;
- Operasional teknologi ini tidak dibebankan hanya pada satu K/L.

- Diharapkan adanya dukungan Bappenas terkait dengan penambahan anggaran dalam mekanisme proses Rancangan SNI (RSNI) produk pangan iradiasi baru yang akan diusulkan oleh K/L terkait.
- Perlu sosialisasi kepada masyarakat yang lingkungannya lebih luas, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait teknologi iradiasi;
- Perlunya kajian mengenai apakah teknologi iradiasi sudah memenuhi persyaratan keamanan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Kemenko Marves akan mendorong realisasi pengembangan teknologi iradiasi bagi produk KP:
- Kemenko Marves akan mendorong BRIN dalam pembuatan kajian atau feasibility study terkait dengan rencana pembangunan unit radiator baru dikarenakan BRIN sebagai instansi yang memiliki teknologi, SDM dengan keahlian di bidang nuklir dan pengalaman riset yang sejalan dengan bidang iradiasi.
- Tiga lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan fasilitas iradiasi baru di Indonesia antara lain: Surabaya, Makassar dan Medan dengan masing-masing 2 model baik dengan menggunakan Sinar Gamma dan MBE (Mesin Berkas Elektron),
- Kemenko Marves akan mengendorse kepada Bappenas khususnya terkait dengan penambahan anggaran dalam mekanisme proses Rancangan SNI (RSNI) produk pangan iradiasi baru yang akan diusulkan oleh K/L terkait. Terkait dengan penunjukan otoritas kompeten yang mengelola fasilitas teknologi iradiasi di Indonesia, akan ditentukan pada langkah kemudian.



Kunjungan lapangan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan dukungan penyusunan dokumen rancangan kebijakan adalah Kunjungan Lapangan Fasilitas Iradiator yang Dibutuhkan oleh Berbagai Sektor Industri Serta dalam Upaya

Gambar 11. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer dengan hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Rel-ion, sebelumnya dikenal sebagai Indogamma, merupakan nama dagang dari fasilitas iradiasi gamma komersial yang pertama di Indonesia. Fasilitas irradiator ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT. Rel-ion Sterilization Services. Peralatan sistem proses iradiasi dirancang oleh General Atomic Radiation Sterilizer Inc. (USA) pada tahun 1991, yang juga merancang bangunan irradiator. Bisnis utama Rel-ion adalah menyediakan jasa iradiasi gamma untuk proses sterilisasi peralatan medis, produk farmasi, produk kosmetik dan kemasan, serta proses pasteurisasi untuk produk pangan.
- Fasilitas irradiator Rel-ion terletak di Cibitung (Cikarang Barat), Bekasi kurang lebih 35 km di sebelah timur Jakarta. Luas tanahnya kira-kira 20.000 M². Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan frekuensi terjadinya gempa, kandungan zat kimia dalam tanah dan aspek-aspek potensial dari lingkungan yang lain.
- Ruang radiasi berukuran 131 M² dengan ketebalan dinding dan atap hampir 2 M. Ruang radiasi ini dibangun dari pondasi beton yang sangat kuat, dengan berat jenis beton 2,54 gr/cc sehingga mampu menyimpan sampai 6.000.000 Curie Cobalt 60 dalam kondisi aman.
- Kolam air de-ionized dengan dimensi 7,01 x 8,23 x 1,68 M³ terletak di tengah-tengah ruang radiasi, digunakan sebagai kolam penyimpanan sumber Cobalt 60. Saat ini kapasitas maksimal ruang radiasi untuk menyimpan Cobalt 60 yang diizinkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah 4.000.000 Curie.
- Area gudang dibagi menjadi 2 dengan pembatas pagar yaitu "UNPROCESSED AREA" dan "PROCESSED AREA". Luas area gudang adalah 1.200 M². Di luar area tersebut, ± 120 M dicadangkan untuk penempatan produk dengan status "REJECT" dan "HOLD".
- Sterilisasi dengan sinar gamma merupakan salah satu teknologi yang sangat aman. Proses iradiasi adalah proses penyinaran dengan sinar gamma di dalam sebuah ruang iradiasi dengan menggunakan Cobalt 60 sebagai sumber energi gamma. Daya tembus sinar gamma akan merusak jaringan mikroorganisma yang berbahaya serta membunuhnya tanpa meninggalkan efek samping yang buruk terhadap produk.
- Sinar gamma mampu menembus berbagai jenis produk dan hanya dapat ditahan oleh sejumlah besar air atau Timbal (Pb), karena itulah penyinaran gamma dapat

pula men-sterilkan produk yang sudah dikemas secara kedap udara. Proses penyinaran gamma tidak akan meningkatkan suhu dari produk ataupun meninggalkan residu kimia pada produk. Produk yang melalui penyinaran gamma biasanya dapat segera digunakan setelah proses penyinaran gamma selesai.

- Fasilitas irradiator gamma terdiri dari empat komponen utama yaitu: Perisai Biologis, Sistem Keamanan, Sistem Sumber, dan Sistem Konveyor.

Tindak lanjut dari kunjungan lapangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sinergisitas bersama antar K/L terkait untuk memasukkan Irradiator dalam infrastruktur Program LIN guna meningkatkan kualitas mutu produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan sehingga bisa berdaya saing dengan produk kelautan dan perikanan negara lain.
- Perlu dilakukan upaya untuk menerapkan standar mutu produk impor yang masuk ke Indonesia agar di Iradiasi terlebih dahulu sebelum dipasarkan dalam negeri.
- Perlu dicarikan solusi yang efektif dan efisien untuk menjaga rantai pasok dingin saat diiradiasi.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berkirim surat kepada BRIN perihal pembuatan *feasibility study* dengan hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Salah satu target capaian didalam RPJMN 2020 - 2024 adalah tercapainya target nilai ekspor produk, kelautan dan perikanan (KP) Indonesia yakni sebesar USD 0,2 M pada tahun 2024.
- Terdapat kendala yang dapat mempengaruhi capaian target tersebut yakni adanya penolakan ekspor produk kelautan perikanan Indonesia oleh negara buyer yang dilibatkan faktor mutu produk KP yang tidak sesuai dengan standar persyaratan negara buyer.
- Berdasarkan data BKJPM-IKP sebagai otoritas kompeten ekspor produk KP Indonesia diketahui beberapa kendala hingga saat ini disebabkan antara lain adanya kontaminasi bakteri Salmonella, Histamin, Decompose, logam berat sampai temuan jejak covid 19 baik pada produk, kemasan luar serta kemasan dalam. Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dan teknologi tepat guna lainnya diharapkan selain mampu mengakomodir beberapa kendala pada point 3 diatas, dapat pula mengimplementasikan dalam pemenuhan kebutuhan persyaratan mutu internasional,

- Pengembangan pemanfaatan Teknologi Iradiasi dan teknologi tepat guna lainnya dibutuhkan oleh dunia industri baik untuk sektor produk KP maupun pada sektor produk pertanian, alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya. Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama K/L terkait berencana untuk mendorong pengembangan teknologi Iradiasi di 3 titik lokasi Kawasan strategis yakni Surabaya, Belawan-Medan dan Bitung-Manado,
- Terkait dengan point B, maka perlu diadakan survey bersama antara BRIN dan lintas K/L guna dapat menentukan teknologi yang tepat dalam upaya meningkatkan ekspor produk KP Indonesia.

d) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan, TW II ini persentase pencapaiannya adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Telah terbit sebanyak 10 sertifikat izin edar pangan olahan (izin MD) untuk UMKM pangan olahan berbahan dasar ikan (Pempek Palembang) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang (ASSPPEK)
- Telah dilakukan fasilitasi koperasi sektor kelautan dan perikanan dengan K/L terkait untuk dukungan peningkatan produktivitas hasil tangkapan dan pemasaran melalui fasilitasi bantuan sarana dan prasarana serta fasilitasi dukungan akses permodalan
- Telah terbit sertifikat TKDN kincir air 1 phase buatan dalam negeri produksi PT Barata bekerja sama dengan Poltek KP Sidoarjo dengan Nomor Tanda Sah: 6199/SJ-IND.8/TKDN /7/2021 dengan nilai 40.15%
- Telah terbit sertifikat SNI produk kincir air 1 phase produksi PT Barata Indonesia dengan No. Sertifikat: PCS 01078.01
- Telah terbit TKDN produk kincir air 1 phase produksi PT Om Whahaha dengan No. Sertifikat: 2013/SJ-IND.8/TKDN/6/2022
- Telah terbit TKDN produk kincir air 3 phase produksi PT Om Whahaha dengan No. Sertifikat: 471/SJ-IND.8/TKDN/3/2022
- Telah dilakukan pemasangan reefer container pada KM Bukit Raya (Armada PT PELNI) kapasitas 1 ton (1 unit) dan 5 ton (1 unit) dengan rute Jakarta-Blinyuan-Natuna-Pontianak-Surabaya

- Telah terbangun prototipe reefer container kapasitas 1 dan 5 ton serta 20 dan 40 feet produksi PT INKA (Persero) dan dalam proses pengujian sertifikasi SNI dan TKDN oleh LSPro.

Sebagai tambahan progres dari penyusunan dokumen rancangan kebijakan tersebut, pada TW II ini juga telah dilaksanakan rapat koordinasi teknologi *carbon capture storage* (CSS) sebagai salah satu kunci utama untuk Indonesia menuju net zero emission. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa:

- ExxonMobil akan melakukan evaluasi terhadap 12 lapangan lokasi Oil & Gas untuk mendapatkan lokasi prioritas pelaksanaan project CSS. Dari 12 lapangan tersebut, 7 diantaranya dikelola oleh Pertamina. Guna mempercepat proses evaluasi, tim ExxonMobil memerlukan segera data dukung di 12 lapangan lokasi Oil & Gas tersebut. Kendala saat ini belum selesainya penandatanganan Confidentiality Agreement dengan pemerintah Indonesia sebagai pemilik data sehingga data belum bisa didapatkan oleh tim ExxonMobil.
- Pembahasan regulasi terkait CSS akan berjalan paralel dengan kementerian terkait bersamaan dengan perkembangan project CSS. Adapun isu yang diprediksi memerlukan waktu lama dalam penyelesaian yaitu cross border dan saline aquifer yang berada diluar wilayah kerja.

Atas hal yang disampaikan tersebut, tindak lanjut dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- ExxonMobil agar segera menyusun timeline dan kerangka besar project Carbon Capture Storage yang akan dilakukan bersama Pertamina.
- Kemenko Marves perlu memberikan dukungan dalam bentuk pengawalan proses studi Carbon Capture Storage dalam rangka percepatan proses evaluasi penentuan lokasi pilot project dengan batas waktu terselesaikan bulan September yang dilakukan oleh tim ExxonMobil.
- Perlu dilakukan pengawalan dan dukungan terhadap penyusunan regulasi terkait Carbon Capture Storage.

9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada TW II Tahun 2022 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia

Output antara yang dihasilkan pada TW II dalam rangka penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia adalah Pemprov DKI telah mengadopsi IKLI dalam Renstra DKPKP untuk Tahun 2023-2026.

Pengukuran IKLI akan dilakukan pada akhir tahun. Saat ini, Kemenko Marves mendorong provinsi untuk dapat memasukan pengukuran IKLI pada renstra masing-masing provinsi. Kebijakan Kelautan Indonesia dan IKLI disosialisasikan bersamaan dengan momen sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Provinsi. Hingga Juni 2022, telah dilakukan sosialisasi pengukuran IKLI.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap, pada TW Tahun 2022 output antara yang telah dihasilkan adalah dokumen pengawalan regulasi kebijakan perikanan tangkap, peningkatan kapasitas dan perlindungan SDM perikanan tangkap, dokumen pengawalan regulasi dengan melakukan percepatan penyusunan rancangan Perpres Lambung Ikan Nasional dan pengendalian implementasi Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang STCW-F dan Permen-KP No. 33 Tahun 2021 dan dokumen uji petik pemetaan kompetensi awak kapal perikanan dan nelayan sebagai implementasi pelaksanaan

Perpres No. 18 Tahun 2019 di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan NTT. Selain itu dilakukan pengawalan program Kampung Nelayan Maju dan masih dalam proses pembahasan program BBM subsidi bagi nelayan dan dokumen pengaturan kapal perikanan mendorong pemanfaatan kembali kapal ex moratorium yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas industri perikanan tangkap.

Pada TW II, terkait pemetaan kompetensi nelayan dan awak kapal perikanan disimpulkan bahwa pendataan terkait nelayan, awak kapal perikanan dan kapal perikanan masih perlu diperbaiki sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan terupdate, lalu masih kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, terbatasnya anggaran untuk program pengembangan kapasitas dan keterampilan dan perlunya dorongan peralihan perizinan ke KKP secara mutlak sehingga mudah dalam melakukan koordinasi satu pintu. Nelayan atau awak kapal perikanan perlu mendapatkan keterampilan dan keahlian agar kesejahteraannya dapat meningkat. Usaha perlindungan bagi awak kapal perikanan masih perlu ditingkatkan dan perlu adanya pemantauan bersama terkait pemenuhan hak-hak awak kapal perikanan.



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pemetaan Kompetensi Awak Kapal Perikanan



Gambar 13. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Pemetaan Kompetensi Awak Kapal Perikanan

Kemudian dalam rangka pelaksanaan koordinasi sinergitas kampung nelayan maju, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Diusulkan adanya penambahan 2 daerah baru untuk dimasukkan kedalam program tersebut, Adonara Timur dan daerah Maluku Utara.
- Perlu adanya masukan ke masing masing RKPD daerah sehingga ada sinkronisasi antara Pusat dan Daerah, dan juga akan



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Rapat

- membantu dengan menyiapkan edaran untuk dapat menyelipkan Anggaran terkait dengan Kampung Nelayan Maju untuk dimasukkan ke RKPD
- Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - KKP akan bersurat dengan kementerian terkait terutama Kemendes, KemenBUMN, KemenDagri dan KemenKoperasi dan UKM untuk dapat menyiapkan Perjanjian Kerja Bersama antar instansi
 - Setelah itu akan bersurat Kembali ke Kemendagri untuk dapat melakukan screening RKPD antar daerah, ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran untuk memasukkan usulan tersebut kepada provinsi agar memastikan anggaran tersedia di setiap Kabupaten/Kota.



Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat

Selanjutnya pada pembahasan perkembangan implementasi STCW-F-1995, diketahui bahwa:

- Adanya permintaan dari perusahaan internasional terkait surat perpanjangan sertifikat ANKAPIN yang telah terbit lebih dari 5 tahun dan tidak memiliki sertifikat pengukuhan (endorsement);
- Masa berlaku sertifikat ANKAPIN yang ada di STCW-F tidak mengatur bahwa kadaluarsa setelah 5 tahun,

sehingga akan dicek kembali ke perusahaan yang mensyaratkan dan regulasi-regulasi lain yang mengatur awak kapal;

- Kewenangan penerbitan sertifikat ANKAPIN dan endorsement sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2005, setelah adanya UU CK No. 11 Tahun 2020, kewenangan tersebut dilimpahkan ke KKP dan diatur dalam PermenKP No. 33 Tahun 2021, namun implementasinya belum dijalankan oleh KKP dan meminta pihak Kemenhub untuk terus melanjutkan sertifikasi awak kapal hingga bulan Juni 2022;
- Pengaturan terkait sertifikat pengukuhan (certificate of endorsement) yang diatur oleh Kementerian Perhubungan sudah tidak berlaku karena tidak sesuai dengan hasil ratifikasi STCW-F 95, seharusnya sudah menjadi kewenangan KKP untuk melakukan pembaruan setelah diterbitkannya PermenKP No. 33 Tahun 2021, namun dengan adanya surat dari KKP ke Kemenhub yang meminta perpanjangan sertifikasi sementara hingga bulan Juni 2022, sehingga proses sertifikasi endorsement menjadi terhambat dan selama masa peralihan ini Kemenhub hanya mengeluarkan sertifikat ANKAPIN baru.
- Tindak lanjut dari pembahasan tersebut adalah perlu disiapkan surat dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Marves kepada Dirjen Perikanan Tangkap KKP terkait progress implementasi pelimpahan kewenangan sertifikasi awak kapal perikanan yang sudah dijalankan sesuai PermenKP No. 33 Tahun 2021.

Pada pembahasan rancangan perpres M-LIN, hal-hal utama yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Penentuan kriteria penetapan status LIN yang ada di Pasal 3 akan dicek kembali dengan kesesuaian data dan kondisi Maluku dan Maluku Utara saat ini karena keberadaan sumber daya ikan yang dinamis berubah-ubah;
- Implementasi Perpres tersebut akan dituangkan pada dokumen rencana pengelolaan sebagaimana halnya tercantum pada Pasal 5, tidak perlu lagi menggunakan rencana induk (dokumen rencana induk akan disusun setelah Perpres disahkan);
- Dengan adanya kebijakan perikanan terukur tidak mempengaruhi konsep lumbung ikan, sehingga kedua kebijakan tersebut dapat berjalan beriringan dan saling mendukung;
- Proses pengajuan rancangan Perpres akan dibahas dengan memperhatikan mekanisme pengusulan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 8. Data Kondisi Kapal Hasil Identifikasi Ground Checking

No.	LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	UKURAN (GT)	SIAP OPERASI	PROSES PERBAIKAN	RUSAK	RUSAK SUDAH BERAT DISCRAP	
1	Ambon	PT SINAR ABADI CEMERLANG SMG	16	155-166	1	2	13		
		PT. S & T MITRA MINA INDUSTRI	9	120-494			9		
2	Tual	PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA	9	203-263	2	2	5		
3	Dobo	PT. JADE TAICINDO PRATAMA	8	298-575			8		
4	Warabal	PT. AKFI	7	346-499			7		
5	Benjina	PT. INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA	51	110-424		2	34		15
6	Bitung	PT. OCEAN MITRAMAS	6	42-783		6			
		PT. VIRGO INTERNUSA	16	26-292		1	15		
7	Kendari	PT. TRI KUSUMA GRAHA	4	151			4		

No.	LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	UKURAN (GT)	SIAP OPERASI	PROSES PERBAIKAN	RUSAK	SUDAH BERAT	SUDAH DISCRAP
		PT SINAR PESONA LAUT	4	124-239	2	1	1		
8	Merauke	PT ZHANG ZHIXIAN	4	265-268			4		
9	Sorong	PT. AMADEHO	2	105-165			2		
		PT. DWI BINA UTAMA	11	137-246	1	2	8		
10	Muara Baru	PT SAMUDERA MANDIRI SELATAN	3	101-147			3		
		PT ARTAMINA JAYA	1	90			1		
11	Banyuwangi	PT OCEAN MITRAMAS	2	321-628				2	
		PT OKISHIN FLORES	1	532					1
12	Benoa	PT INTIMAS SURYA	2	75-106		2			
		PT SARI SEGARA UTAMA	19	28	2		12	5	
		PT AKFI	1	498				1	
		PT JAYAKOTA	5	59-218			4		1
		PT GOLDEN TUNA	1	38			1		
13	Bacan	PT OCEAN MITRAMAS	1	628		1			
Jumlah			183		8	19	131	8	17

Tabel 9. Data Dokumen Perizinan Kapal Hasil Identifikasi

No.	LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	DOKUMEN PERIZINAN PERIKANAN PADA KKP			DOKUMEN SERTIFIKASI KAPAL PERIKANAN PADA KEMENHUB			
				SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN	GROSS AKTA	PAS BESAR	SURAT UKUR	SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL
1.	AMBON	PT SINAR ABADI CERLANG SMG	16	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT. S & T MITRA MINA INDUSTRI	9	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
2.	TUAL	PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA	9	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
3.	DOBO	PT. JADE TAICINDO PRATAMA	8	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
4.	WARABAL	PT. AKFI	7	DICABUT	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU

No.	LOKASI	PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL	TOTAL UNIT	DOKUMEN PERIZINAN PERIKANAN PADA KKP			DOKUMEN SERTIFIKASI KAPAL PERIKANAN PADA KEMENHUB			
				SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN	GROSS AKTA	PAS BESAR	SURAT UKUR	SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL
5.	BENJINA	PT. INDUSTRI PERIKANAN ARAFURA	51	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
6.	BITUNG	PT. OCEAN MITRAMAS	6	DICABUT	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT. VIRGO INTERNUSA	16	DICABUT	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
7.	KENDARI	PT. TRI KUSUMA GRAHA	4	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT SINAR PESONA LAUT	4	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
8.	MERAUKE	PT ZHANG ZHIXIAN	4	DICABUT	TIDAK BERLAKU		TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
9.	SORONG	PT. AMADEHO	2	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT. DWI BINA UTAMA	11	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
10.	MUARA BARU	PT SAMUDERA MANDIRI SELATAN	3	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT ARTAMINA JAYA	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
11.	BANYUWANGI	PT OCEAN MITRAMAS	2	DICABUT	-	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT OKISHIN FLORES	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
12.	BENOA	PT INTIMAS SURYA	2	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT SARI SEGARA UTAMA	19	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT AKFI	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU		MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT JAYAKOTA	5	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
		PT GOLDEN TUNA	1	DICABUT	TIDAK BERLAKU	-	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
13.	BACAN	PT OCEAN MITRAMAS	1	DICABUT	-	TIDAK BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	MASIH BERLAKU	TIDAK BERLAKU
Jumlah			183							

Rapat menyepakati akan menggunakan rancangan Perpres hasil review KKP pada tahun 2020 (sebagaimana terlampir). Tindak lanjut dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas detail penyesuaian data saat ini;
- Akan dilakukan rapat tingkat Menteri

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT)

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT), pada Triwulan II Tahun 2022 ini capaian progres yang telah dicapai

adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah dokumen kerja sama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH dalam proyek *Solar Cold Chain for a Green Economy* (SOCOOL) 2022 sampai dengan 2024 dan Dokumen pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan Kajian Rantai Pasok DIngin Hijau (*Green Cold Chain*) di Sektor Perikanan dengan GIZ dan P2M Universitas Indonesia. target penyelesaian kajian tersebut adalah Bulan Desember 2022.

Dokumen kerja sama GIZ dan SOCOOL tertuang dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia terkait Kerja Sama Teknis tahun 2019 di tanda tangani oleh Kementerian Keuangan (Perwakilan Pemerintah Indonesia) tanggal 23 Juni 2021. Saat ini, dokumen Implementation Agreement (IA) dalam tahap pembahasan teknis dari masing-masing K/L untuk penyusunan IA.

Project SOCOOL merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman yang telah disepakati pada tanggal 23 Juni 2021. Hal-hal yang disampaikan pada pelaksanaan FGD Aprisal Mission Project Solar Cold Chain For A Green Economy (SOCOOL) Kerja Sama Teknis Indonesia-Jerman adalah sebagai berikut:

- Kerja sama dengan GIZ sudah dilakukan dari tahun 2020 bersama KKP dan Kementerian ESDM untuk Pembangunan 12 (dua belas) PLTS Atap pada fasilitas Cold Storage. Untuk tahun 2022 Kementerian ESDM dalam tahap penyusunan pembangunan PLTS Atap, KKP akan mengusulkan titik lokasi pembangunan PLTS Atap untuk realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- Kemenko Marves telah melakukan peninjauan di beberapa titik lokasi PLTS Atap pada fasilitas Cold Storage, dan salah satu hasil peninjauan tersebut adalah kurangnya kompetensi tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemeliharaan pengadaan PLTS Atap, sehingga diharapkan Project SOCOOL dapat membantu meningkatkan kompetensi tenaga SDM;
- Mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Teknis tahun 2019 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, untuk Project SOCOOL mendapati anggaran sebesar €5,00 euros;
- GIZ akan menghitung target net zero emission sebagai capaian Project SOCOOL dan terkait Solar Ice Maker yang diinisiasi oleh GIZ dapat meningkatkan daya saing

produk dalam negeri dengan mengoptimalkan pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

- Pengadaan fasilitas system rantai pasok dingin oleh KKP seringkali mengalami kendala listrik yang kurang stabil terutama di wilayah timur Indonesia, yang akhirnya memberatkan pihak Pengelola;
- Dit. Logistik mempunyai Data Usulan Pembangunan 121 Lokasi Cold Storage dan 126 Pabrik Es;
- Project SOCOOL mempunyai 3 (tiga) output yakni:
 - Isu Strategis Nasional dan Rencana Investasi, dengan Sistem Rantai Dingin Tenaga Surya sebagai standar yang ditentukan;
 - Mengsinergikan Peneliti, Produsen, dan Pengguna untuk pengembangan sitem rantai pasok dingin;
 - Kelayakan Sistem Rantai Dingin bertenaga surya yang ditunjuk sebagai pilot project yang disarankan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan melaksanakan rapat lanjutan dala rangka penyusunan implementation agreements (IA) dengan mengundang Kementerian dan/atau Lembaga (K/L) Teknis terkait untuk merumuskan peran dari masing-masing K/L.

d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan II Tahun 2022 persentase yang telah dicapai adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah dokumen koordinasi konsep pengelolaan Pasar Ikan Modern di 3 lokasi yaitu Kota Palembang, DKI Jakarta, dan Kabupaten Bandung, dokumen monitoring terkait bantuan cold storage portable dari KKP untuk mendukung peningkatan pemasaran ikan di Kab. Sukabumi, Kab. Madura, dan Kab. Subang dan dokumen pemetaan potensi perikanan dan kelautan di Kab. Tambrauw, Prov. Papua Barat yang sedang diupayakan untuk menjadi SKPT wilayah Papua Barat.

Kunjungan lapangan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemasaran dilakukan pada Triwulan II ini pada lokasi Kabupaten Sukabumi, Subang dan Sampang.

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemasaran di daerah Kab Sukabumi didapatkan hasil sebagai berikut:

- Monitoring terkait bantuan Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Sukabumi

2020 berupa gedung beku kepada Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru, Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi dalam rangka mempertahankan mutu produk dan peningkatan pendapatan masyarakat sektor perikanan.

- Bantuan Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kepada 5 Koperasi yang berada di Madura, Pasuruan, Bondowoso, Subang, dan Sukabumi.
- Berdasarkan informasi, saat ini gudang beku telah memasok ikan hingga Muara Baru dan Lampung. Koperasi juga telah memanfaatkan jaringan pemasaran melalui sosial media seperti facebook marketplace. Keberadaan gudang beku juga berhasil mempertahankan harga ikan karena mutu ikan yang disimpan tidak menurun mutu dan kualitasnya.
- Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Akan dilakukan monitoring dan evaluasi di lokasi penerima bantuan gudang beku dilokasi lain.
 - Melakukan Koordinasi dengan K/L terkait guna membahas permasalahan yang ditemukan.
 - Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru, Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi akan menyampaikan surat kepada KKP terkait permohonan penambahan kapasitas Cold Storage dan ABF.

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemasangan di daerah Kab Subang didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Money Pemasaran Kab Subang

- Monitoring terkait bantuan Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018-2021 berupa gedung beku tang di kelola Dinas Perikanan Kab. Subang, KUD Mandiri Mina Fajar Sidik dan Kelompok UMKM “Aroma Jaya” Pengolahan Ikan Asin

dan Pemindangan Ds. Blanakan, Kec. Blanakan, Kab. Subang dalam rangka mempertahankan mutu produk dan peningkatan pendapatan masyarakat sektor perikanan.

- Bantuan yang pernah di terima dari Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah:
 - Cold Storage / Gudang Beku volume 50 Ton (Tahun Anggaran 2018) yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang, dan sekarang ini disewakan ke pihak swasta PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia.
 - Cold Storage / Gudang Beku volume 30 Ton yang dilengkapi dengan ABF (Air Blast Freezer) yang merupakan suatu mesin untuk proses pembekuan ikan dengan volume 1 Ton Tahun 2020 (Desember 2020) di kelola KUD Mandiri Mina Fajar Sidik.
 - Cold Storage / Gudang Beku volume 30 Ton (Desember 2021) di kelola Kelompok UMKM “Aroma Jaya” Pengolahan Ikan Asin dan Pemindangan.
- Kendala yang dialami oleh nelayan di Subang adalah Perbankan tidak memiliki cukup ketersediaan cash sehingga para nelayan yang ingin mengambil cash harus menunggu 2-3 hari. Karena kondisi tersebut membuat keterlabatan dalam proses transaksi.
- Kendala lain juga terkait pengelolaan TPI yang mana mengacu UU nomor 23 Tahun 2018 tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tidak dapat di laksanakan untuk TPI di Subang ini dikarenakan tanah yang dijadikan TPI diakui sebagai tanah milik Perum Otorita Jatiluhur (POJ), sehingga Pemrov tidak bisa membangun fasilitas untuk mengopomalisasi TPI, namun pengelola TPI masih

dipungut retribusi oleh Pemda Subang, sehingga konsisi ini perlu di carikan solisi yang tepat agar pengelolaan TPI bisa optimal.

- Tindak lanjut dari kunjungan lapangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Koordinasi dengan K/L terkait guna membahas permasalahan yang ditemukan.
 - Meminta Pemda agar mengirimkan surat terkait permohonan bantuan mobil pendingin kepada KKP guna optimalisasi rantai dingin guna menjaga kualitas mutu produk KP yang akan dipasarkan.

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemasangan di daerah Kab Sampang didapatkan hasil sebagai berikut:

- Monitoring terkait bantuan Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020



Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan Monev Pemasaran Kab Sampang

berupa gedung beku kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Sejahtera, Kec. Sampang, Kab. Sampang dalam rangka mempertahankan mutu produk dan peningkatan pendapatan masyarakat sektor perikanan.

- Potensi Perikanan Kabupaten Sampang sangat besar terutama produk budidaya Bandeng, dimana bandeng yang dihasilkan oleh pebudidaya di Sampang memiliki kualitas Bandeng sangat baik dibanding daerah lain.
- Salah satu pemasar di Kabupaten Sampang yang berlokasi di Jalan Banyuasri Kecamatan Sampang . Kelompok ini berjumlah 10 orang sudah termasuk ketua, sekretaris dan bendahara.
- Ketua Pokhlasar Sejahtera adalah H. Kusnadi dan mulai tahun 2014 sudah mengembangkan sayapnya untuk berusaha di bidang pemasaran ikan.
- Bantuan yang pernah di terima dari Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah:
 - Kendaraan Berpendingin Roda 6 Tahun 2017

- Cold Storage / Gudang Beku volume 30 Ton yang dilengkapi dengan ABF (Air Blast Freezer) yang merupakan suatu mesin untuk proses pembekuan ikan dengan volume 1 Ton Tahun 2020 (Desember 2020)
- Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Melakukan Koordinasi dengan K/L terkait guna membahas permasalahan yang ditemukan.
 - Mendorong Kelompok Pengolah dan Pemasar Sejahtera, Kec. Sampang, Kab. Sampang dalam optimalisasi lokasi bangunan cold storage bisa dimanfaatkan sebagai rumah makan berbasis ikan air tawar, ikan air payau dan ikan laut.
 - Meminta Pemda agar mengirimkan surat terkait permohonan bantuan mobil pendingin kepada KKP.

e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi, pada Triwulan II Tahun 2022 persentase progres yang telah dicapai adalah 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah dokumen sinergitas baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan standar kualitas dan kuantitas hasil ekspor produk KP yang baik dan terintegrasi, dokumen kesepakatan bersama dengan KKP terkait penerapan sistem jaminan mutu produk KP dan dokumen pelaksanaan koordinasi untuk penetapan Kota Bitung sebagai *pilot project* penanganan produk KP yang terpadu.

Dalam rangka mendukung penyusunan dokumen rancangan rekomendasi kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kunjungan lapangan perihal peninjauan optimalisasi sarana dan pra-sarana penunjang mutu produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan pra-sarana penunjang mutu produk kelautan dan perikanan.

Perihal kunjungan lapangan terkait peninjauan optimalisasi sarana dan pra-sarana penunjang mutu produk kelautan dan perikanan hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan kunjungan lapangan TPI Higienis Lempasing dan serta UPI PT. Sumber Sarilaut Perkasa, PT. Tonga Thiarma Persada dan LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:



Gambar 19. Dokumentasi Kunjungan Lapangan

- Fasilitas penunjang mutu produk KP di TPI Lempasing kurang optimal dalam jumlah dan pemanfaatannya;
- Proses perizinan di tataran dinas daerah yang masih berbelit-belit sehingga mempersulit kegiatan investasi;
- Ketersediaan bahan baku khususnya rajungan kurang.
- Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Mengawal perbaikan pemanfaatan fasilitas penunjang mutu produk KP TPI Lempasing;
 - Membantu mendorong peningkatan investasi melalui koordinasi dengan K/L terkait untuk memudahkan perizinan yang masih kerap menjadi penghambat di tataran instansi pemerintah;
 - Mendorong Ditjen. Perikanan Budidaya-KKP untuk melakukan inovasi terkait dengan penyediaan kebutuhan bahan baku rajungan.

Dan terkait kunjungan lapangan perihal optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang mutu produk kelautan dan perikanan didapatkan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

- Jumlah petugas mutu masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kapal ikan yang melakukan aktivitas pembongkaran dan pendaratan ikan sehari-hari;
- Baru ada satu orang petugas mutu yang tersertifikasi mutu HACCP sementara lainnya belum sehingga secara kompetensi perlu mendapat bimtek/pelatihan;



Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

- Belum memiliki unit laboratorium kecil yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung monitoring mutu harian guna mengetahui kualitas ikan hasil tangkapan yang didaratkan. Jenis uji hanya formalin dan dilaksanakan diruang kerja staf;
- Secara umum Ditjen Perikanan Tangkap belum

memiliki standarisasi terkait jumlah dan kompetensi petugas mutu di seluruh Pelabuhan perikanan baik PPS, PPN, PPP dan PPI.

- Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - Perlu ada penyesuaian baik jumlah dan kompetensi dari petugas mutu di PPS Bitung;
 - Perlu disediakan fasilitas laboratorium mini guna melengkapi dari hasil monitoring mutu yang dilaksanakan oleh petugas mutu;
 - Perlu dilakukan upaya pembuatan standarisasi petugas mutu pada lingkup PPS, PPN, PPP dan PPI untuk mendukung penyediaan bahan baku ikan yang baik di hulu;
 - PPS Bitung perlu dijadikan Pilot Project dalam penanganan hasil tangkapan ikan yang baik. Hal ini dikarenakan secara umum PPS Bitung dalam pelaksanaannya telah memperhatikan dan menerapkan aspek Cara Penanganan Ikan yang baik serta sanitasi dan higienitas;
 - Akan dilaksanakan rencana implementasi program penggunaan aplikasi Fish On sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan;
 - PPS Bitung belum memiliki fasilitas PLTS Atap sehingga Kemenko Marves perlu mendorong bantuan PLTS Atap dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penyediaan energi alternatif yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional listrik di PPS Bitung dan sebagai upaya efisiensi dan penghematan biaya konsumsi listrik.

f) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan, pada TW Tahun 2022 capaian yang dihasilkan adalah 50% dengan output antara yang dicapai adalah telah terbit sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB) dengan No Sertifikat PW-S.01.04.1.3.332.06.22-0069 tanggal 29 Juni 2022 untuk Garam Farmasi Natrium Klorida PT Karya Daya Syafarmasi. Dengan adanya sertifikat ini, maka menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam rangka mendorong pemenuhan garan industri jenis farmasi berbahan baku lokal yang selama ini sebagian besar dipenuhi melalui mekanisme impor.

Pada TW II juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyusunan dokumen rancangan rekomendasi kebijakan yang dimaksud. Kegiatan kunjungan lapangan dan koordinasi rencana kerjasama PT. Garam dengan K-UTEC AG Salt Technologies di sektor pergaraman dilaksanakan dengan tujuan menindaklanjuti nota kesepahaman antara PT Garam dengan K-UTEC AG Salt Technologies dengan Nomor KS-04/GRM/I/2022 dan nomor MOU-



Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan

ID/KUTEC/ 01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan sebagai bagian dari Rencana Kerjasama PT Garam dengan K-UTEC AG Salt Technologies di sektor pergaraman tanggal 25 April - 29 April 2022. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

- Dalam kunjungan K-UTEC di lahan pegaraman PT Garam, telah didapatkan beberapa temuan yang menjadi rekomendasi awal dari K-UTEC. Mereka menyebutkan bahwa PT Garam harus melakukan modernisasi lahan produksi mereka. Modernisasi akan berpengaruh besar terhadap produktivitas PT Garam untuk menghasilkan garam konsumsi dan industri yang diinginkan. Selain itu, K-UTEC juga melihat adanya pengeluaran dari PT Garam dalam aktivitas produksi

yang perlu untuk direduksi, hal ini akan berpengaruh besar untuk menciptakan harga garam yang kompetitif dengan harga impor

- K-UTEC memberikan opsi bilamana kerjasama di bidang produksi garam farmasi nantinya telah disepakati, maka skema pendanaan dapat melalui KfW Development Bank yang juga memiliki komitmen terhadap layanan kesehatan. Namun PT Garam harus memastikan untuk membeli seluruh hasil dari pabrik garam farmasi tersebut dengan Offtake Agreement.
- PT Garam merespon baik hasil kunjungan yang dilakukan oleh K-UTEC dan berharap bahwa hasil analisa yang dilakukan akan berdampak positif terhadap rencana kerjasama yang akan dilakukan. Saat ini PT Garam berfokus pada transformasi industri pergaraman yang akan melibatkan perusahaan sektor pergaraman yang telah terbukti dan diakui dunia internasional. PT Garam tahun 2023 telah menargetkan dapat menghasilkan garam industri lebih dari 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan soda ash dan soda kaustik dari beberapa pabrik yang telah menjalin kerjasama.
- Saran dan tindak lanjut yang diberikan atas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - PT Garam perlu mendetailkan dan memfinalisasi pra-studi kelayakan pembangunan pabrik kaustik soda yang akan menjadi bagian dari transformasi PT Garam. Dalam kajian pra FS yang dilakukan melalui kerjasama PT Garam dengan ITS disebutkan potensi pembangunan pabrik NaOH liquid dengan kapasitas 160.000 ton/tahun
 - Kemenko Marves akan melakukan fasilitasi rencana kerjasama yang saat ini sedang dianalisa oleh pihak K-UTEC
 - Kemenko Marves akan melakukan pembahasan kembali tindak lanjut pemanfaatan pabrik pengolah garam rakyat Manyar Gresik bersama PT Garam, Kementerian BUMN, BRIN, dan Kementerian Keuangan.

Berikutnya, dilaksanakan koordinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka rencana kerjasama investasi modernisasi pergaraman antara PT. Garam dan Dev Salt Pvt Ltd (DSPL) di Madura dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas rencana kunjungan lapangan yang akan dilakukan oleh DSPL dengan didampingi oleh Konsulat Jenderal RI-Mumbai, pada lahan pergaraman yang berada di Pulau Madura dan Teluk Kupang-NTT milik PT Garam dan serta melihat

kondisi eksisting lokasi lahan produksi PT Garam yang rencananya akan dimodernisasi/transformasi melalui kerjasama dengan pihak-pihak potensial. Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- PT Garam membutuhkan kerjasama ini sebagai upaya untuk melakukan modernisasi lahan garam yang menjadi bagian dari transformasi perusahaan.



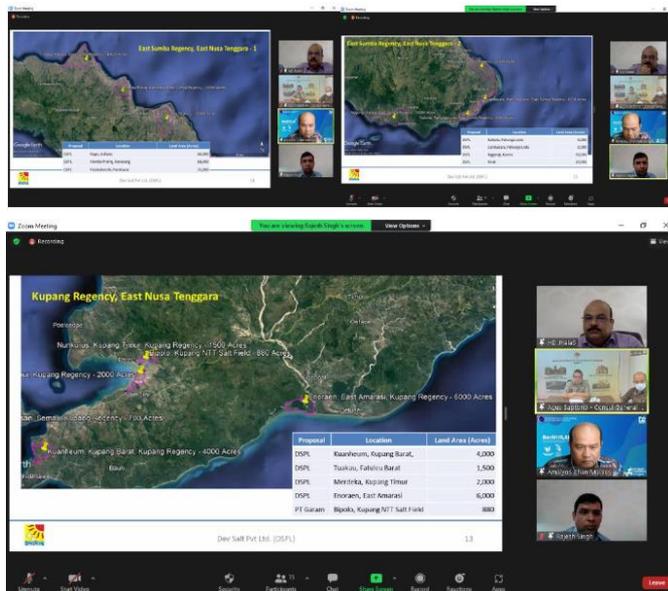
Gambar 22. Dokumentasi Kunjungan Lapangan

Modernisasi perlu segera dilakukan mengingat pada tahun 2023 PT Garam diharapkan dapat memproduksi kurang lebih 1.3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Caustic Soda dan HCl hasil kerjasama PT Garam dengan PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik dan PT Kaltim Parna Industri.

- Dari hasil data produktivitas lahan di atas, maka diperoleh gambaran data di lapangan bahwa lahan pergaraman Pamekasan merupakan lahan yang paling baik diantara tiga lahan lainnya. Adapun produktivitas lahan pergaraman Sumenep yang pernah mencapai di atas 100 ton/tahun/ha, capaian hasil tersebut merupakan faktor dari perbaikan lahan di tahun 2017. Sehingga setiap sarana dan prasarana di lahan dapat berfungsi dengan baik. Namun selanjutnya data menunjukkan, meski luas lahan garam di Sumenep I merupakan yang paling luas, namun tidak sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor sedimentasi pada pesisir pantai yang digunakan untuk pengambilan air laut. Sedangkan untuk wilayah pergaraman di Bipolo, PT Garam belum mendapatkan produktivitas optimum dikarenakan masih adanya hujan dan kelembapan yang berdampak negatif saat musim produksi.
- DSPL memberikan catatan bahwa pada meja kristalisasi PT Garam perlu dipertimbangkan agar tidak menggunakan plastik geomembran. Teknologi ini dianggap menghambat kuantitas dan kualitas. Bilamana ingin produksi lebih produktif, maka dapat dilakukan melalui pembuatan garam di atas meja garam (Salt Floor). PT Garam sebelumnya telah menginisiasi hal tersebut, namun

terdapat pertimbangan sosiologis dimana penggunaan geomembran dapat mengakomodir keberadaan tenaga manusia (warga petambak garam di sekitar PT Garam) yang biasa turut andil memanen lahan PT Garam pada musim panen.

- Pada pergaraman Teluk Kupang pihak DSPL menyatakan butuh lahan yang lebih luas dikarenakan dengan lahan seluas 304 Ha, maka produksi tidak akan maksimal sehingga tidak seimbang dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk produksi dan distribusi logistik. Namun demikian, DSPL menyatakan kondisi lahan di Teluk Kupang sangat mendukung untuk aktivitas produksi pergaraman
- Di sela-sela peninjauan lapangan juga telah dilakukan penandatanganan Non Disclosure Agreement (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan Informasi antara PT Garam dan DSPL.
- Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Kemenko Marves perlu kiranya mendukung dan memfasilitasi proses transformasi PT Garam melalui modernisasi lahan produksi yang akan dilakukan melalui mekanisme kerjasama investasi. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan transformasi BUMN sektor pergaraman meliputi tiga aspek, yakni: finansial, rekayasa teknologi, dan rekayasa sosial-budaya.
 - Kemenko Marves selanjutnya dapat mendorong dilakukannya pertemuan intensif secara B to B antara PT Garam dan DSPL guna menegosiasikan kerjasama yang akan dilakukan.
 - Selain dengan pihak DSPL saat ini PT Garam juga dalam tahap peninjauan kerjasama dengan pihak K-UTEC asal Jerman yang juga telah terbukti berhasil dalam mengembangkan industri garam. Rencananya pihak K-UTEC akan melakukan kunjungan lapangan pada minggu terakhir bulan April di Madura, dan pihak Kemenko Marves juga diminta untuk mendampingi proses peninjauan kerjasama antara PT Garam dan pihak K-UTEC tersebut.



Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi

Hal-hal yang disampaikan pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada Saat ini DSPL telah melakukan analisa mandiri untuk mengidentifikasi lahan potensial untuk dijadikan lokasi investasi. Luasan lahan yang diminati oleh DSPL sebesar 3000-4000 Ha. Dari total 39 daftar lokasi potensial yang dimiliki oleh DSPL (daftar terlampir), terdapat 2 wilayah yang sangat diminati oleh Kabupaten Sumba Timur dan Satu wilayah di Kabupaten Kupang. Analisa yang dilakukan oleh DSPL berdasarkan peta google earth sehingga belum mempertimbangkan topografi dan kondisi sosial masyarakat.
- DSPL disarankan agar mengunjungi lokasi yang telah dilakukan survei sebelumnya ataupun berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Indonesia agar lebih efisien dan efektif dalam pemilihan lahan untuk investasi.
- Lokasi yang saat ini disarankan oleh pemerintah Indonesia antara lain: Jawa Timur (Kangean), NTT (Bipola, Timor Tengah Selatan), NTB (Ngali dan Boal).
- Lahan Potensial di Pulau Kangean saat ini dikuasai oleh PT. Perhutani. Kurang lebih terdapat 1.000 Ha lahan yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tambak garam.
- Berdasarkan pemetaan lahan garam di Teluk Kupang, terdapat lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Perizinan pemanfaatan lahan dalam bentuk HGU oleh Kementerian ATR dengan rekomendasi dari Pemprov NTT
- Kendala yang mungkin dihadapi antara lain: sulit mencari lahan 3000-4000 Ha dalam satu areal yang kompak; masyarakat adat/lokal biasanya mengakui lahan sebagai hak ulayat; lokasi belum memiliki akses yang baik

Selanjutnya pada TW II juga dilaksanakan pembahasan rencana kerjasama investasi pergaraman DSPL dan PT. Garam (Persero). Tujuannya adalah sebagai indentifikasi awal atas minat investasi dari DSPL terhadap pengembangan komoditas pergaraman di Indonesia melalui kerjasama dengan PT Garam (Persero).

- Pihak DSPL menginginkan informasi biaya sewa lahan sebagai pertimbangan investasi. Estimasi biaya yang dikeluarkan adalah 10-15 % dari gross production, selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi yang mengacu pada regulasi Pemda setempat.
- PT Garam menyarankan lokasi Bipolo di Kupang sebagai salah satu lahan yang bisa digunakan. Lokasi ini memiliki kualitas air yang bagus dan kelandaian yang sesuai untuk produksi garam. Adapun kondisi saat ini, peralatan yang dimiliki oleh PT Garam di lokasi tersebut dalam kondisi rusak akibat badai Seroja.

Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kemenko Marves akan memfasilitasi rencana investasi dan kerjasama pembangunan dan pengembangan pergaraman di Indonesia antara DSPL dan PT Garam yang meliputi rencana pemanfaatan lahan ekstentifikasi yang cukup prospek. Untuk itu direncanakan kunjungan lapangan ke wilayah potensial yakni di Pulau Madura dan Kecamatan Sulamu, Bipolo Kabupaten Kupang-NTT yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemda setempat;
- b. Pihak DSPL yang diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 18 April 2022, perlu kiranya didampingi oleh pihak PT Garam untuk melakukan audiensi kepada Pejabat yang berwenang sebelum melakukan kunjungan lapangan baik ke Madura maupun Kabupaten Kupang, NTT.

g) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim

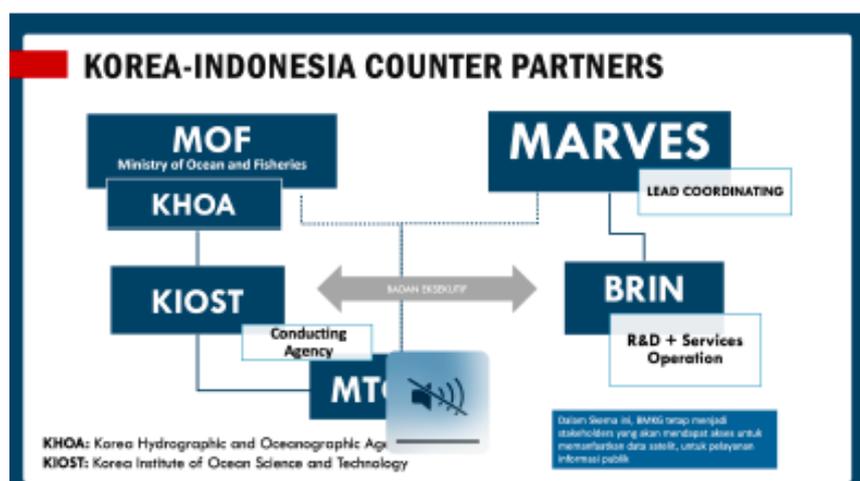
Pada TW II, penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim telah mencapai progres 50% dengan output antara yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Dokumen pembahasan implementasi ODA Project pemanfaatan satelit GEO-KOMPSAT-2B milik korea “Establishment of Application System for Managing Indonesian Waters Using Korean Geostationary Satellite” ·
- Draft awal Implementing Arrangement (IA) ODA Project Pemanfaatan Satelit ini yang telah diperoleh dari pihak KHOA, dan sedang dalam pembahasan antara MTCRC dan internal Marves. Rujukan IA ini adalah MoU kerjasama bidang kemaritiman antara Indonesia dan Korea tahun 2016, dan IA Pembentukan lembaga MTCRC tahun 2018.

- MoU on Maritime Cooperation Indonesia dan Korea sedang dalam proses perpanjangan. Telah ada diplomatic notes kedua negara terkait perpanjangan MoU.
- Draft IA ODA Project akan dibahas di internal Kemenko Marves dengan memperhatikan masukan dari Biro Hukum, Biro Umum dan Inspektorat. Setelah disetujui secara internal, akan dibahas bersama dengan BRIN terkait tugas dan tanggungjawab BRIN dalam project ini. (sebagai main counterpartner yang akan melakukan riset, mengoperasikan peralatan, server, dan penyediaan ruangan)

Pelaksanaan kerjasama Korea-Indonesia dalam ODA Project Pemanfaatan Satelit Geo Kompsat 2B melibatkan instansi Kemenko Marves dan BRIN. Kemenko Marves sebagai penerima resmi ODA Project bertanggung jawab atas dukungan konsultasi, koordinasi dan monitoring diantara para pemangku kepentingan dalam kegiatan proyek R&D. Sedangkan BRIN akan mendukung dalam hal riset, survey, pengembangan sistem (R&D) dan pusat pengelolaan layanan (termasuk data center) yang akan menjadi rujukan bersama stakeholders untuk secara bersama-sama memperoleh manfaat penggunaan satelit. Perwakilan pihak pemerintah Korea MOF (Ministry of Ocean and Fisheries)/KHOA (Korea Hydrographic and Oceanographic Agency) adalah KIOST (Korea Institute of Ocean Science and Technology). Kegiatan pendukung dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pelaksanaan rangkaian rakor dengan BRIN untuk kebutuhan teknis perihal fasilitas infrastrukutr data center, peraturan, pengembangan kapasitas, survey lokasi dan juga perizinan peneliti asing yang akan terlibat.

Tiga isu maritim di Indonesia yang menjadi fokus perhatian MTCRC untuk dikembangkan kedepan adalah dukungan riset terkait logistik, lingkungan laut



Gambar 24. Grafik Kerjasama Indonesia-Korea

dan potensi perikanan. Topik kerjasama terkait ketiga isu ini diantaranya: *oceanography, blue carbon, ocea pollution, smart aquaculture, stock assessment* dan lain-lain.



Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rapat

Perihal *geostationary satellite 2022* dan *capacity building 2023*, hal-hal penting yang disampaikan dalam diskusi adalah sebagai berikut:

- Kepala OR BRIN memiinta agar dilakukan rapat koordinasi teknis khususnya untuk ODA satelit 2022 bersama dengan lembaga yang nantinya ditunjuk menjadi Executive Agency dalam hal pengelolaan server, storing, security, dan access data dalam project ini. BRIN juga akan melibatkan lintas Kedeputan dan Direktorat serta Pusat Riset di BRIN terkait MOU/IA, aspek legal, pemanfaatan fasilitas, dll.
- Diharapkan para pakar terkait kerjasama satelit ini antara lain: (a) Open Access, kemudahan akses data untuk pemanfaatan secara bersama-sama; (b) MAPIN dan komunitas ingin berpartisipasi di Hilirisasi Riset data, berupa development sistem yang aplikatif. (c) Diharapkan agar riset yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk publik, nelayan, dan masyarakat maritim secara luas.
- Dalam hal kerjasama riset pada ODA proyek capacity building 2023, OR Kebumian dan Maritim akan menyediakan pakar, mengidentifikasi rumah program riset pada Pusat Riset yang relevan dan potensi kerjasama pemanfaatan Pusat Riset.
- Tempat potensial untuk pusat penelitian dan pembelajaran adalah Pari Island, dimana terdapat botanical garden, marine station, ekosistem perikanan, terumbu karang, dll, dan disebutkan salah satu yang memiliki fasilitas terbaik untuk pendidikan dan penelitian.
- Tindak lanjut yang diusulan antara lain: melaksanakan Rapat koordinasi teknis dengan para Direktur, OR, PR dan K/L yang terkait, untuk pembahasan lebih mendetil terkait pemanfaatan fasilitas BRIN, executive Agency, draft MOU/IA, aspek legal, server, Open Access, dll dan emberikan dukungan terhadap

pelaksanaan ODA geostationary satellite 2022 yang saat ini telah disetujui oleh Pemerintah Korea.

h) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan, hal-hal yang telah dikoordinasikan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi "Strengthening Collaboration between Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim and United Nations in Indonesia"
 - Pada kesimpulannya disepakati bahwa UN siap berkontribusi dalam *technical assistance and expertise*.
 - UN juga bersedia mendukung dalam hal pengembangan pembuatan kebijakan dan *roadmap*
 - UN akan membantu dalam sinergitas antar *stakeholders* yang terkait
- Pelaksanaan koordinasi dengan Aspotmar Kasal
 - Arahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Restorasi mangrove dilaksanakan mengikuti prosedur teknis, standar dan kriteria mulai dari meliputi kegiatan persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan. Pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di pesisir hendaknya dilakukan melibatkan partisipasi stakeholders terkait.
 - TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan program kerja pemberdayaan pertahanan laut melalui penanaman mangrove secara nasional, selain program yang sudah ada, dapat melakukan kegiatan silvofishery yang merupakan kegiatan penghijauan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui budidaya.
 - Progres yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - TNI AL telah melaksanakan pengembangan Maritim Food Estate di Jembrana, Bali dengan Program Kampung Bahari Nusantara yang fokus pada budidaya udang vaname teknologi Ultra Intensive Aquaculture Technology.
 - Program silvofishery memadukan pengelolaan tambak masyarakat gabungan mangrove dengan budidaya udang windu dan atau kepiting. Silvofishery merupakan salah satu program alternatif untuk menjaga

pelestarian hutan mangrove. Tepatnya, sebuah program budidaya di kawasan pertambakan tradisional yang bermuara untuk kepentingan pelestarian lingkungan hutan bakau

- Di Lombok Utara telah ada model Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan metode budidaya bioflok udang tambak selinder di sekitar mangrove. Pengelolaan bioflok dilaksanakan oleh ibu-ibu secara berkelompok kerjasama dengan swasta. Mereka dikoordinir oleh seorang ibu pengusaha tambak intensif. Pakan, benih dan operasional listrik dikelola bersama.
- Yayasan Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Alune sedang mengembangkan model Climate Smart Shrimp (CSS). CSS adalah sebuah inovasi untuk budidaya udang intensif berkelanjutan dan kegiatan restorasi mangrove. Calon lokasi adalah Sukamara, Muara Gumbang, Lubuk Keriang, Ketapang, Pinrang.
- Rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan penanaman mangrove yang akan dilaksanakan dapat disinergikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya silvofishery yang melibatkan masyarakat, budidaya udang intensif dengan model bioflock maupun kegiatan pemanfaatan mangrove sebagai lokasi wisata dan pengolahan mangrove untuk obat-obatan maupun minuman.
 - TNI AL dalam pelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan KKP, KLHK, Perguruan Tinggi, Pemda, mitra pembangunan, NGO, dan lembaga profesi yang terkait di lokasi penanaman mangrove. Selain itu hendaknya juga dapat berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD, dibentuk melalui keputusan Gubernur) yang berperan sebagai wadah dalam koordinasi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove di daerah.
- Pelaksanaan koordinasi pengembangan Lumbung Ikan di Tual
 - Hal yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Target 6 kapal eks moratorium telah beroperasi dengan kelengkapan perizinan SIUP dan SIPI dari KKP, sementara masih ada 3 kapal yang belum beroperasi dikarenakan menunggu proses perbaikan (docking);
 - Menghasilkan produksi sebanyak 300 ton dari WPP 718;

- Proses MoU antara KKP dengan Science and Technology Research Center of China Customs on progress; dan
- Surat usulan kerja sama “Coronavirus Irradiation Sterilization Program” di Tual Fishery Port and Industrial Estate untuk dimasukkan ke dalam skema MoU Maritime Cooperation telah disampaikan ke pihak RRT.
- Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - Produktivitas kapal dan produksi masih rendah, harusnya dapat mencapai > 900 ton untuk direct call dari Tual ke RRT;
 - Regulasi (PermenKP) tentang tata cara pungutan PNBP sumber daya perikanan melalui sistem kerja sama belum diundangkan/persetujuan;
 - Proses MoU antara KKP dengan Science and Technology Research Center of China Customs belum ada draf final; dan
 - Surat usulan kerja sama CISP di Tual Fishery Port and Industrial Estate belum mendapat konfirmasi tindak lanjut.
- Arahan Menko terkait kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Konfirmasi penetapan PermenKP;
 - KKP mempercepat draf final MoU (timeline penandatanganan pada 9 Juli 2022 di Bali); dan
 - Penetapan jadwal kunjungan Menko Marves, MenKP dan Menhub sekaligus launching direct call.

3.1.4 Learning and Growth

10. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Pada Triwulan II Tahun 2022, pelaksanaan bimbingan teknis yang telah diikuti oleh pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Penyusunan KAK dan RKA-K/L TA 2023 pada 6-8 April 2022

- Workshop Fotografi dan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat pada 11-14 April 2022
- Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional pada 21-23 April 2022
- Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko SPBE pada 24 Juni 2022
- Bimbingan Teknis Penyusunan RKAKL TA 2023 pada 27-29 Juni 2022

11. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2022. Pada Tahun 2022 ini target Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah 75 sedangkan target persentase PMPRB di Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 90%.

Dalam rangka mendukung capaian persentase PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022 telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh tim assessor Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Inspektorat Kemenko Marves. Berikut pada tabel 8 merupakan hasil penilaian terhadap Komponen Pengungkit di delapan area perubahan PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebagai berikut:

Tabel 10. Indikator Penilaian PMPRB Deputy II Tahun 2022

		PENILAIAN	BOBOT	NILAI
I.		PEMENUHAN	14.60	13.28
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	1.82
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00	0.75
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2.00	2.00
	4	PENATAAN TATALAKSANA	1.00	1.00
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40	1.29
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.31
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20	2.08

		PENILAIAN	BOBOT	NILAI
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.03
II.	REFORM		21.70	20.30
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	3.00
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	2.00
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50	1.50
	4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	2.63
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00	1.75
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	3.72
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	1.95	1.95
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.75
TOTAL PENGUNGKIT			36.30	33.58

12. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2021 sesuai dengan PK Deputy SD Maritim sebesar 96. Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D. Pada Triwulan II Tahun 2022 terdapat 316 berkas keuangan yang telah diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya dan terdapat 3 data berkas kontraktual

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan nomor: SP DIPA-120.01-350494/2022 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 17.226.000.000 yang kemudian anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021 dan Nomor: S-458/MK.02/2022, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Alokasi Pagu Anggaran Efektif Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI BLOKIR 1 DAN 2	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp3.500.000.000	Rp359.249.000	Rp3.140.752.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp2.800.000.000	Rp338.377.000	Rp2.461.623.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp2.700.000.000	Rp324.074.000	Rp2.375.926.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp2.250.000.000	Rp297.200.000	Rp1.952.800.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp2.250.000.000	Rp300.639.000	Rp1.949.361.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI BLOKIR 1 DAN 2	PAGU EFEKTIF
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp1.526.990.000	Rp136.108.000	Rp1.390.882.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp2.200.000.000	Rp208.884.000	Rp1.991.116.000
	JUMLAH ANGGARAN	Rp17.226.990.000	Rp1.964.530.000	Rp15.262.460.000

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan II TA 2022 mencapai realisasi anggaran sebesar 40,42% (Rp. 16.168.365.418) dengan detail anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Anggaran TW II TA 2022 Per Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi TW II	Persentase
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp 3.140.752.000	Rp 1.052.322.251	33,51%
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.461.623.000	Rp 868.964.964	35,30%
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp 2.375.926.000	Rp 1.054.637.911	44,39%
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp 1.952.800.000	Rp 815.418.582	41,76%
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp 1.949.361.000	Rp 653.128.518	33,50%
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp 1.390.882.000	Rp 549.503.064	39,51%
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp 1.991.116.000	Rp 1.1174.390.128	59,98%

Berdasarkan data table 10. Dapat diketahui kegiatan yang mendapatkan capaian realisasi tertinggi adalah kegiatan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebesar 59,98% (Rp 1.1174.390.128), kemudian realisasi capaian kegiatan tertinggi kedua yaitu kegiatan Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya sebesar 44,39% (Rp 1.054.637.911). Berikut adalah realisasi secara detail per RO:

Tabel 14. Realisasi Anggaran TW II TA 2022 per RO

Kode	RO	Pagu Efektif	Realisasi TW 2	Persentase
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap	Rp 747.314.000	Rp 236.501.288	35,30%
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp 1.110.133.000	Rp 363.701.106	32,76%
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Rp 604.176.000	Rp 268.762.570	44,48%
ABR.004	Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	Rp 782.308.000	Rp 375.709.646	48,03%
ABR.005	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	Rp 777.929.000	Rp 269.068.532	34,59%
ABR.006	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Budidaya	Rp 815.689.000	Rp 409.859.733	50,25%
ABR.007	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	Rp 651.135.000	Rp 284.283.818	43,66%
ABR.008	Rekomendasi Kebijakan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Rp 650.630.000	Rp 248.710.710	38,23%
ABR.009	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Rp 651.035.000	Rp 282.424.054	43,38%
ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp 1.346.206.000	Rp 453.249.647	33,67%
ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	Rp 897.177.000	Rp 283.680.884	31,62%
ABW.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan	Rp 897.369.000	Rp 315.391.720	35,15%
ABW.004	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman dan Marine Bioproduct	Rp 679.057.000	Rp 207.314.932	30,53%
ABW.005	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	Rp 687.029.000	Rp 230.102.596	33,49%
ABW.006	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ilmu Pengetahuan, Ristek dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp 583.275.000	Rp 215.710.990	36,98%
ABW.007	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp 1.390.882.000	Rp 549.503.064	39,51%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 119.942.000	Rp 45.905.675	38,27%
EBA.962	Layanan Umum	Rp 850.878.000	Rp 477.594.853	56,13%

Kode	RO	Pagu Efektif	Realisasi TW 2	Persentase
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 301.945.000	Rp 210.352.883	66,67%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 528.939.000	Rp 254.814.117	48,17%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 189.412.000	Rp 185.722.600	98,05%

Berdasarkan data realisasi per RO, dapat dilihat bahwa capaian tertinggi TW II Tahun 2022 untuk Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yaitu pada RO Pemantauan dan Evaluasi dengan realisasi 98,05% (Rp185.722.600) dan RO Layanan Umum dengan realisasi 66,67% (Rp 210.352.883) untuk. Untuk capaian tertinggi TW II realisasi per RO untuk Rekomendasi Kebijakan yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Budidaya dengan realisasi 50,25% (Rp 409.859.733).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada TW II Tahun 2022 adalah penggunaan aplikasi SAKTI yang dengan sistem baru sehingga menyebabkan adanya adaptasi dan mempengaruhi proses penginputan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran. Aplikasi SAKTI ini merupakan pengganti dari aplikasi SAS yang pada tahun sebelumnya digunakan untuk melaksanakan pelaporan keuangan Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



BAB
4

PENUTUP

Pada Triwulan II Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berprogres guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 ini:

- SS.1: Dalam rangka mendukung Capaian IKLI Tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi pengukuran IKLI dan Pemprov DKI telah mengadopsi IKLI dalam Renstra DKPKP tahun 2023-2026.
- SS.2: Dalam rangka mendukung capaian SS.2 ini telah dilakukan penyusunan regulasi, pengawalan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pada pengelolaan perikanan tangkap dan telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Tahun 2022-2024 dalam mendukung perikanan budidaya.
- SS.3: Dalam rangka mendukung capaian SS.3 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian Kawasan konservasi dan capaian IKLI tahun 2022.
- SS.4: Dalam rangka mendukung capaian SS. 4 ini telah dilaksanakan penyusunan Perpres Ekonomi Biru untuk mendukung program Blue Halo S dan telah dilakukan pengawalan terkait kebijakan penangkapan ikan terukur.
- SS.5: Dalam rangka mendukung capaian SS. 5 ini telah disepakati Crash Program Revitalisasi dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Tahun 2022-2024 yang disahkan didalam SK Pokjanas Kemenko Marves.
- SS.6: Dalam rangka mendukung capaian SS. 6 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian nilai ekspor pada sektor perikanan tahun 2022
- SS.7: Dalam rangka mendukung capaian SS. 7 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergarman telah terbit sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB), pada capaian pelaku atau kelompok terfasilitasi telah diterbitkan sertifikat TKDN dan SNI untuk kincir air 1 phase, TKDN kincir air 1 phase dan 3 phase, telah dibangun prototype

reefer container, dan dalam mendukung capaian jumlah riset telah dibuat draft awal Implementing Arrangement (IA) ODA.

- SS.8: Pada TW II Tahun 2022, sudah terdapat progress yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim dengan persentase progress mencapai 50% yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.9: Pada TW II Tahun 2022, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim persentase progress mencapai 50% yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.10: Pada Triwulan II Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- SS.11: Pada Triwulan II tahun 2022 telah dilaksanakan validasi penilaian mandiri PMPRB di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.
- SS.12: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan II TA 2022 mencapai realisasi anggaran sebesar 40,42% (Rp. 6.168.365.418)

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan kami bahwa laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pihak yang terkait.